BALAIRUNG

Saat Militer Bukan Hanya Serdadu

EDISI 54/TH. XXXIII/2018

ISSN 0215-076X

selamat datang

mahasiswa biasa

di **kampus** yang

biasa-biasa saja

iklan layanan masyarakat ini
dipersembahkan oleh

Dua puluh tahun yang lalu, seluruh elemen masyarakat turun ke jalan, termasuk mahasiswa. Gedung DPR RI, Bundaran UGM, serta jalan-jalan besar di berbagai tempat di Yogyakarta penuh sesak oleh para demonstran. Tidak hanya itu, sekitar satu juta orang berkumpul di Alun-Alun Yogyakarta untuk mendengarkan maklumat dari Sri Sultan Hamengkubuwana X. Melalui maklumat tersebut, Sultan menghimbau masyarakat untuk mendukung gerakan reformasi.

Pencabutan dwifungi ABRI ialah salah satu tuntutan yang diajukan saat itu. Tuntutan ini dilayangkan karena ABRI dianggap sebagai alat pemerintah yang otoriter, serta mengakibatkan banyaknya kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Dalam *Merintis RI yang Manusiawi karya* Y.B. *Mangunwijaya* (1999), dwifungsi ABRI dipandang memilih masalah ganda. Permasalahan tersebut meliputi tingkat kedewasaaan masyarakat sipil, pemerintahan, dunia kehakiman, legislatif, adat-istiadat tidak tertulis, derajat pendidikan serta kedewasaan politis atau kultural dari ABRI. Tokoh masyarakat yang dikenal dengan panggilan Romo Mangun ini juga memandang perlunya normalisasi kedudukan angkatan bersenjata di bawah sipil. Menurutnya, pemerintahan militer lebih tepat untuk keadaan perang, darurat, dan tidak normal.

Bertepatan dengan dua puluh tahun reformasi yang jatuh pada tahun ini, BALAIRUNG mempersembahkan Majalah Edisi 54 yang berisi tentang bahasan seputar dwifungsi ABRI. Isu dwifungsi ABRI terpilih melalui mekanisme eksekusi tema yang melibatkan empat divisi. Keempat divisi tersebut ialah Redaksi, Litbang, Perusahaan, dan PdA. Pengerjaan majalah dimulai dengan bursa tema pada bulan Maret untuk menampung aspirasi awak mengenai isu yang akan diangkat. Lalu dilanjutkan dengan pra-reportase selama seminggu sebelum tema-tema tersebut dipilih melalui mekanisme musyawarah.

Majalah ini akan diisi dengan empat rubrik tematik yaitu dua artikel Laporan Utama (Laput), Sisi Lain, dan Kajian. Laput 1 membahas tentang struktur komando teritorial, dan Laput 2 tentang peran TNI dalam bidang pertanian. Sisi lain menuliskan tentang intervensi dan hegemoni TNI terhadap masyarakat. Sementara Kajian menyajikan penyelidikan BALAIRUNG tentang bisnis militer yang masih bertahan di era reformasi. Selain keempat rubrik tersebut, artikel-artikel nontematik lainnya juga mengususng tema-tema yang dekat dengan mahasiswa.

Terakhir, melalui Majalah Edisi 54/TH. XXXIII/2018 ini kami hanya berusaha untuk memantik nalar kritis pembaca lewat isu-isu yang ada di sekitarnya. Harapannya, pembaca dapat menentukan arah ke mana akan berpijak dengan bijak.

Selamat berproses wahai Anda para MAHAsiswa!

Pembina drg. Ika Dewi Ana, M. Kes., Ph.D **Pemimpin Umum** Muhammad Unies Ananda Raja **Koordinator Majalah** Fahmi Sirma Pelu **Tim Kreatif** Annisa Alfath, Beby Putri Adriansa Pane, Maheswara Nusantoro, Rizky Ramadhika Sunarso **Pemimpin Redaksi** Bernard Evan Kanigara **Editor** Ahmad Fauzi, Cintya Faliana, Citra Maudy Mahanani, Henny Ayu Amalia, Ni Nyoman Oktaria Asmarani, Rio Bagus Saputro, Sandy Maulana Yusuf **Penulis** Andara Rose Kharismanah, Anggriani Mahdianingsih, Anisa Nur Aini, Ayu Nurfaizah, Fatima Gita Elhasni, Hanif Janitra Satriawan, Harits Naufal Arrazie, Jalu Tathit Pancapurna, Muhammad Nur Khoriul Fajar, Nabila Rieska Maulani, Noor Rasya S. Anindyanari, Putri Soleha, Rahma Ayu Nabila, Rinaldi Hadisaputra, Rizal Zulfiqri Ahmad, Vania Rebecca C., **Kepala Litbang** Kenny Setya Abdiel **Editor** Alnick Muhammad Nathan, Jihadir Rahman, Nadia Imerelda **Penulis** Fadhilla Dwi Prameswari Rayes, Luqman Abdul Maliq, Matthew Alexander W. F., Olivia Prastiti, Rayhan Wildan Ramadhani, Setyaningsih, Tita Meydhalifah, Wida Dhelweis Yistiarani **Pemimpin Perusahaan** Luthfi Muchlis **Staf Perusahaan** Dimas Maqrufi, Gisa Astania Sabila, Priscilla M. Bening Situmorang, Rizky Aditya S., Siti Murdiah **Kepala Produksi dan Artistik** Dwiky Rama Yanuar **Kurator** Andrea N. Khalis, Anindyo Frezio, Amar Ma'ruf Irfan, Chandra Hadi, Marchyella Satyavita, Kurnia Putri Utomo **Fotografer** Ananta Widi Raihan, Arjun Pratiq Zamzamy Subarkah, Maulidya Rahmania Atikah, Syfa Amelia **Ilustrator** Deny Reza Saputra, Fitria Dewi Sartika, R. Gilang Septa Mulya, Muhammad Rusmul Khandiq, Nisa Nur Haniva **Penata Letak** Clarisa Dessy Uijaya, Upavasa Cyadzidananda **Ilustrasi dan Konsep Kulit Muka** Fitria Dewi Sartika

Alamat Redaksi, Sirkulasi, Iklan dan Promosi
Kompleks Perumahan Dosen UGM, Bulaksumur B-21, Kec. Depok,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Indonesia, Yogyakarta 55281

 @bppmbalairung /bppmbalairungugm @bppmbalairung @GSJ9240C /balairungpress.com /jurnal.ugm.ac.id/balairung

DAFTAR ISI

© Nisa/BAL

Saat Militer Bukan Hanya Serdadu

Bangunan Kementerian Kebenaran yang terletak di sebuah jalan kota Oceania terlihat begitu mencolok. Bentuknya limas yang sangat besar dan terbuat dari beton putih mengilap, menjulang setinggi tiga ratus meter di udara. Dari sana terlihat dengan jelas, mencuat putih dengan huruf-huruf yang anggun dari salah satu tiga slogan partai, "Perang ialah damai".

Kata-kata "Perang ialah damai" menjadi ungkapan yang paradoks. Bagi George Orwell dalam bukunya 1984 (2014), perang bukanlah bertujuan untuk menaklukkan lawan. Melainkan, ia bertujuan untuk menjaga keutuhan dan ketangguhan rakyat. Perang menyatukan rakyat dengan menghadirkan "musuh bersama" yang harus ditakuti. Namun di saat yang bersamaan, terdapat keharusan untuk melawan ketakutan tersebut. Partai-partai di Oceania, dalam gambaran Orwell menjadikan perang sebagai hal yang terus menerus dirawat keberadaannya. Perang menjadi seolah ada sekaligus tidak ada.

Kondisi di atas tentunya terjadi pada narasi Orwell dalam kisah fiksi. Namun, karya sastra merupakan sebuah mimesis, refleksi dari realitas masyarakat yang memproduksinya. Dalam sejarah umat manusia, perang selalu melekat dan menjadi rangkaian sejarah itu sendiri. Menurut Keith F. Otterbein dalam bukunya *How War Began* (2004), perang bahkan sudah terjadi sejak dua sampai satu juta tahun yang lalu. Otterbein menyebutnya sebagai "pertempuran bersenjata antar komunitas".

Perang terjadi sebagai konsekuensi gaya hidup berburu dan meramu sejak era Paleolitikum. Pemburu yang didominasi lelaki berkelompok berdasarkan hubungan kekeluargaannya untuk mencari makanan. Pertempuran terjadi antar kelompok pemburu untuk memperebutkan wilayah perburuan, tempat bernaung, serta perempuan dari kelompok lain (Otterbein, 2004: 25). Mereka lantas menggunakan alat berburu untuk bertarung dengan sesamanya.

Pola pertempuran ini berlangsung hingga manusia menemukan cara untuk bercocok tanam pada era Mesolitikum. Semenjak kepunahan mamalia besar terjadi pada era itu, manusia memutuskan untuk menetap dan mulai bercocok tanam. Akibatnya kontak

antar pemburu berkurang, sehingga tingkat pertempuran menurun (Moore, Hillman, dan Legge 2000).

Meskipun begitu, perang kembali meningkat ketika umat manusia mulai mengenal sistem suku. Dengan begitu produksi pangan dan jumlah populasi meningkat. Pemukiman kecil berubah menjadi pedesaan. Kelompok yang memiliki akses lebih terhadap sumber daya di pedesaan menjadi kepala suku. Akhirnya kelompok yang berkuasa muncul, seraya diikuti dengan meningkatnya intensitas peperangan (Otterbein, 2004:15).

Dengan berkembangnya pertanian, maka produksi pangan mengalami surplus berlebih. Hasil tersebut harus disimpan dalam tempat penyimpanan. Tempat tersebut menjadi sasaran bagi beberapa kelompok manusia yang masih nomadik. Maka, dibutuhkan kelompok petarung yang dapat melindungi lumbung-lumbung pangan itu. Sejak saat itu, militer pertama kali lahir (Henderson, 2015).

Meski begitu, peperangan yang terjadi pada masa itu, oleh Lawrence H. Keley dalam bukunya *The War Before Civilization* (1997), disebut sebagai "perang primitif". Hal tersebut disebabkan, tentara masih bersifat tidak karuan, tidak efektif, dan tidak profesional (Keeley, 1994:11). Usaha untuk membentuk militer yang lebih tertata baru tercatat pada milenium ke-3 sebelum masehi. Waktu itu, peran tentara berkembang tidak hanya sebagai penjaga surplus pangan, melainkan sebagai pelindung dan pendukung raja. Misalnya, Kerajaan Akadia yang menggunakan militer untuk mempertahankan kedudukan raja jika keadaan perang sedang tidak terjadi (Spielvogel, 2015:13).

Seiring dengan berkembangnya sistem politik, militer lantas berfungsi untuk meredam konflik eksternal dan internal dari suatu negara (Otterbein, 2004:100). Dalam konflik eksternal, militer berfungsi sebagai alat pertahanan dan penaklukan. Sedangkan konflik internal, militer berfungsi untuk merepresi rakyat yang sedang vis-à-vis dengan pemerintah. Konflik ini terjadi karena ketimpangan akibat surplus pangan. Alhasil, rakyat terpecah dalam kelas-kelas. Namun, pemerintah berpihak pada kelas yang lebih kaya dan menguasai alat produksi, serta merepresi kaum pekerja.

Alhasil, militer memiliki kecenderungan untuk mengintervensi pemerintahan dan campur tangan urusan sipil. Hal ini terjadi akibat lemahnya institusi sipil, sehingga timbul ketergantungan sipil terhadap militer. Bahkan, *pretorianism* dapat terjadi ketika militer menjadi aktor utama politik dalam pemerintahan. Sejarah pretorianisme dimulai ketika masa kekaisaran Kaligula di Romawi sebagai campur tangan militer terawal dan paling masyhur di masanya (Iswandi, 1998:9). Rezim militer ini tidak segan untuk menggunakan kekerasan demi memperoleh kekuasaan.

Sifat intervensi militer yang besar seperti pada masa kekaisaran Kaligula, menurut Samuel P. Huntington dalam bukunya *The Soldier and The State* (1957), terjadi lantaran tidak sanggup menahan untuk melampaskan libido politik mereka. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh gaji tinggi dan pengaruh militer yang lebih besar. Oleh karenanya, militer juga menaruh perhatian terhadap distribusi kekuasaan dan status dalam seluruh sistem politik yang ada.

Sejak saat itu, hadirlah kegelisahan di kalangan sipil terkait dengan kemampuan intervensi militer dalam suatu negara. Rakyat mulai sadar, bahwa militer tidak bisa melibatkan dirinya terlalu jauh dalam mimbar politik. Tepat setelah Revolusi Prancis tahun 1789, istilah "militer profesional" muncul. Menurut Huntington, profesional bersifat memerlukan keahlian dan keterampilan khusus, sehingga militer sama derajatnya seperti profesi-profesi lain. Mudahnya, jika petani membawa cangkul, maka militer membawa laras panjang seperti AK-47. Petani tidak akan menembak dan militer tentu tidak akan bercocok tanam.

Usaha untuk melakukan profesionalisasi militer mulanya dilakukan dengan reorganisasi melalui reformasi pendidikan militer di Eropa. Misalnya pembentukan sekolah militer seperti Kriegsschulen di Prussia (1810), Ecole Militaire Supérieure di Prancis (1878) dan Royal Naval College di Inggris (1905). Sementara di Indonesia, profesionalisasi miiliter baru benar-benar dilakukan dengan penghapusan dwifungsi ABRI pada tahun 2000.

Pada praktiknya usaha pengembalian militer kembali pada baraknya tentunya tidak dapat dilakukan dengan sekali jadi. Pada masa pasca-otoritarian Soeharto, konflik lahan yang melibatkan TNI masih terjadi. Misalnya, perampasan lahan dan penganiayaan yang dilakukan oleh TNI-AD di Urutsewu. TNI-AD melakukan pemagaran lahan-lahan warga untuk dijadikan tempat latihan perang-perangan. Jangan lupakan juga konflik tanah ulayat nagari yang melibatkan TNI di tanah Minang.

Meskipun begitu, bukan berarti militer harus dikerdilkan atau bahkan dihapuskan. Militer mesti tetap profesional dalam menjalankan tugasnya yaitu sebagai alat pertahanan negara. Mau tidak mau militer yang profesional tetaplah dibutuhkan. Sebab, "Perang ialah damai" bukan? **[Redaksi]**

Akhirnya, mari membaca dan berdialektika!

Daftar Pustaka

Henderson. (2015). *Key Concept 1.2 "The Neolithic Revolution and Early Agricultural Societies.* Diakses dari History Haven: http://historyhaven.com/APWorldipedia/index.php?title=Key_Concept_1.2_The_Neolithic_Revolution_and_Early_Agricultural_Societies

Huntington, S. P. (1957). *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-military Relations.* Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press.

Iswandi. (1998). *Bisnis Militer Orde Baru: Keterlibatan ABRI Dalam Bidang Ekonomi dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Rezim Otoriter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Keeley, L. H. (1997). *War Before Civilization: The Myth of the Peaceful Savage*. Oxford: Oxford University Press.

Moore, A. T. (2000). *Village on the Euphrates: from foraging to farming at Abu Hureyra*. Oxford: Oxford University Press.

Orwell, G. (2014). 1984. Sleman: Bentang Pustaka.

Otterbein, K. F. (2004). *How War Began*. Texas: Texas A&M University Press.

Spielvogel, J. J. (2015). *Western civilization: Ninth Edition*. Stamford, CT: Cengage Learning.

Jejak Orde Baru dalam Struktur Komando Teritorial TNI AD

Reformasi telah menghapuskan dwifungsi ABRI, tetapi tidak melenyapkannya sampai ke akar. Nyatanya, struktur komando teritorial yang merupakan peninggalan doktrin tersebut masih ada, bahkan sengaja dipertahankan.

Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) bermula dari konsep "Jalan Tengah" yang dicetuskan oleh Jenderal A.H. Nasution pada tahun 1958. Pada saat itu, Nasution menjabat sebagai panglima besar Tentara Keamanan Rakyat (TKR) yang pada 1947 berganti nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Jalan Tengah adalah konsep yang membuka saluran bagi TNI untuk turut serta menentukan kebijakan negara. Dengan begitu, TNI memiliki peluang untuk berperan dalam pemerintahan sipil. Konsep inilah yang akhirnya membuka jalan bagi militer untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan masyarakat hampir di segala bidang.

Menurut Dr. Muhammad Najib Azca, S.Sos., M.A., Dekret Presiden tahun 1959 menjadi awal terlibatnya militer dalam politik. Lewat dekret ini, Presiden Soekarno membentuk DPR baru yang di dalamnya memiliki unsur perwakilan golongan. Salah satu golongan tersebut adalah militer. "Jadi, Soekarno adalah salah satu orang yang memberi pintu masuk bagi militer untuk berperan dalam politik," jelas Dosen Departemen Sosiologi Universitas Gadjah Mada tersebut.

Setelah lengsernya Soekarno, Najib menuturkan bahwa pada tahun 1966, TNI Angkatan Darat (AD) mengadakan konferensi di Bandung yang menghasilkan doktrin dwifungsi ABRI. Menurutnya, dwifungsi ABRI adalah sebuah doktrin yang membenarkan ABRI untuk memiliki fungsi ganda. Fungsi-fungsi tersebut adalah pertahanan dan keamanan (hankam) dan fungsi sosial dan politik (sospol).

Dwifungsi ABRI memungkinkan militer untuk terlibat dalam politik negara. Oleh karenanya, militer banyak mengisi posisi penting di pemerintahan seperti gubernur, walikota, dan bupati. Dwifungsi ABRI juga melegitimasi peran militer dalam

© Fitria/BAL

ranah sipil. Salah satu contohnya adalah keharusan masyarakat meminta izin pada militer ketika hendak melaksanakan pementasan teater atau pemutaran film. Masyarakat pun memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. "Hal ini disebabkan oleh rezim Orde Baru (Orba) yang mengontrol media dan pendidikan untuk memengaruhi pandangan masyarakat," ucapnya.

"Dwifungsi ABRI menjadi modal utama berdirinya rezim Orba. Selain Dwifungsi ABRI, ada tiga modal lain yaitu TNI AD dengan struktur komando teritorialnya, sentralisasi pemerintahan, dan partai politik Golongan Karya. Hal-hal tersebut juga turut melanggengkan berkuasanya rezim Orba selama lebih dari tiga puluh tahun," tambah Najib.

"TNI khususnya AD masih dapat berperan dalam sektor politik karena masih memiliki struktur komando teritorial."

Lama dan korupnya kekuasaan Orba membuat mahasiswa melakukan demonstrasi besar-besaran untuk mengakhiri rezim tersebut pada tahun 1998. Selain mendesak Presiden Soeharto turun jabatan, mereka juga menuntut penghapusan dwifungsi ABRI. "Rezim Soeharto dapat berkuasa begitu lama karena dukungan kuat dwifungsi ABRI," ujar Muhammad Rum, IMAS, Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada.

Menurut Rum, setelah reformasi bergulir, dwifungsi ABRI secara umum telah berhasil dihapuskan. Militer dan polisi yang dulunya tergabung dalam ABRI dipisahkan dan dikembalikan pada fungsinya masing-masing. Militer berfungsi sebagai alat pertahanan negara dan polisi berfungsi sebagai alat kemanan negara. Meskipun begitu, Najib beranggapan bahwa TNI khususnya AD masih dapat berperan dalam sektor politik karena masih memiliki struktur komando teritorial.

Letnan Kolonel Infanteri Agus Musriyanto menjelaskan, struktur komando teritorial adalah rantai komando TNI AD mulai dari Markas Besar (Mabes) di Jakarta hingga Bintara Bina Desa (Babinsa) di desa-desa. Komando dimulai dari Mabes TNI, lalu turun ke Komando Daerah Militer (Kodam), kemudian turun lagi ke Komando Resort Militer (Korem). Selanjutnya, komando tersebut disampaikan ke Komando Distrik Militer (Kodim), lalu ke Komando Rayon Militer (Koramil), dan terakhir ke Babinsa. Sampai saat ini, struktur komando teritorial belum pernah berubah. Agus menuturkan, struktur komando teritorial hanya dimiliki oleh TNI AD karena wilayah darat lebih memiliki potensi ancaman terhadap ketahanan negara dibandingkan laut dan udara. Sebenarnya, TNI Angkatan Udara dan Angkatan Laut juga mempunyai struktur komando teritorial tetapi tidak bersifat menyeluruh layaknya AD.

Agus selaku Staf Teritorial Kodam IV/Diponegoro menuturkan, struktur komando teritorial merupakan warisan dari perang gerilya saat Indonesia berperang melawan Belanda. Walaupun begitu, hingga saat ini, struktur komando teritorial masih tetap digunakan oleh TNI AD. Akan tetapi, Najib beranggapan bahwa keberadaan struktur komando teritorial sudah tidak relevan dengan tugas pokok militer saat ini. "Setelah reformasi, keamanan sudah sepenuhnya menjadi wilayah kepolisian," tutur Najib.

Azifah Retno Astrina, S.I.P., M.P.S. juga mengamini pernyataan Najib. Menurutnya, masih adanya struktur komando teritorial menyebabkan pemborosan anggaran. Ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut sebaiknya digunakan untuk modernisasi militer karena alat utama sistem senjata (alutsista) militer masih tergolong rendah. "Modernisasi itu bisa dilakukan dengan memperbarui alutsista mereka," ungkap Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada tersebut.

Selain itu, Najib menjelaskan bahwa dengan masih adanya struktur komando teritorial, militer justru banyak diberi tugas yang bersifat sosial. Salah satu contohnya adalah mengurusi program pangan. "Buat apa mereka ikut-ikutan mencetak sawah? Padahal itu tidak sesuai dengan tugas mereka," keluh Najib. Ia juga menambahkan bahwa dengan struktur komando teritorial, militer potensial untuk dimanfaatkan atau memanfaatkan diri dalam politik. Pasalnya, dengan kuasa untuk memberi komando dalam memobilisasi massa, militer rentan ditunggangi oleh golongan politik tertentu.

Menurut Rum, bertahannya struktur komando teritorial disebabkan oleh persepsi masyarakat dalam memandang fungsinya sebagai upaya integrasi nasional. Baginya, struktur komando teritorial digunakan agar kawasan terluar Indonesia mendapatkan kontrol. Keberadaan struktur komando teritorial juga diperkuat dengan adanya semboyan "Bersama rakyat, TNI kuat". "Semboyan ini menimbulkan pandangan dalam internal militer untuk tetap mempertahankan struktur komando teritorial," jelasnya.

Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (1999—2001), sempat muncul kabar bahwa struktur komando teritorial akan dihapus. Menanggapi hal itu, Agus pun berdalih jika hal tersebut benar-benar dilakukan, negara Indonesia akan bubar. Pasalnya, struktur komando teritorial mempunyai sifat menyeluruh sehingga TNI akan lebih tanggap dalam menangani permasalahan keamanan. "Apabila struktur komando teritorial dihapuskan, pengawasan keamanan akan semakin kendor," tegas Agus.

Akan tetapi, Najib beranggapan bahwa tidak ada undang-undang yang secara spesifik melegitimasi dipertahankannya struktur komando teritorial. Menurutnya, pembahasan mengenai penghapusan struktur komando teritorial pun masih dianggap terlalu sensitif. "Tidak ada pemimpin politik atau anggota parlemen yang berani merombaknya sehingga struktur komado teritorial masih hadir sampai saat ini," jelas Najib.

Oleh karena itu, Rum merasa perlu diadakannya edukasi agar masyarakat menyadari keberadaan struktur komando teritorial. Edukasi tersebut berfungsi untuk memahami prinsip-prinsip demokrasi, yaitu supremasi sipil. Senada dengan pernyataan Rum, Najib menambahkan perlu adanya upaya menciptakan diskursus kritis bahwa struktur komando teritorial sudah tidak kompatibel dengan demokrasi. Baginya, upaya tersebut akan memengaruhi berbagai kekuatan sosial dan politik sehingga masyarakat dapat memikirkan kembali seperti apa struktur yang diperlukan oleh militer Indonesia. "Struktur komando teritorial itu fosil Orba sehingga sudah sepantasnya dihapuskan," tegasnya. **[Fajar, Harits, Rizal]**

Pertanian Kita di Bawah Sepatu Lars

© Arjun/BAL

Dua puluh tahun reformasi berlangsung, posisi TNI tidak hilang namun hanya bergeser. Jika sebelumnya bertengger di dalam pemerintahan, kini mereka ikut ambil peran di sekitar ladang. Lantas, bagaimana dampaknya terhadap produktivitas dan kesejahteraan petani?

Kamis sore (16-04), seorang pria berkemeja putih mendatangi sekretariat Badan Pers dan Penerbitan Mahasiswa (BPPM) Balairung. Ia adalah Muhammad Rum, Dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada (UGM), yang diundang sebagai narasumber pendalaman tema proyek *Majalah BALAIRUNG* edisi 54. Sembari beralaskan tikar, Rum memaparkan keterlibatan TNI di dalam masyarakat sipil Indonesia. “Menarik ketika mengetahui bahwa masyarakat kitalah yang mengajak militer masuk ke dalam dunia mereka. Fenomena serupa juga terjadi di Mesir,” jelasnya.

Rum menambahkan, keterlibatan itu tidak dapat dilepaskan dari struktur komando teritorial. Dalam buku *The Politics of Military Reform in Post-Soeharto Indonesia*, Marcus Mietzner membenarkan bahwa reformasi telah gagal menghapuskan struktur komando teritorial. Baginya, struktur tersebut menjadikan keberadaan TNI selalu berpautan dengan aktivitas masyarakat sipil, salah satunya dalam bidang pertanian.

Januari 2014 silam, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, dan Panglima TNI saat itu, Gatot Nurmantyo, menandatangani nota kesepahaman bersama. Pengesahan tersebut, seperti yang dilansir dari laman resmi TNI, ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Seperti yang dilaporkan oleh *Kompas*, pertimbangan adanya pelibatan TNI diawali oleh kerja sama Gubernur Sulawesi Selatan dengan Komando Daerah Militer (Kodam) setempat. Kerja sama itu diklaim efektif meningkatkan produksi pangan.

Tahun 2011, Instruksi Presiden Nomor 5 juga telah dikeluarkan untuk memberi dasar hukum bagi Program Upaya Khusus (Upsus) percepatan peningkatan produksi pangan.

Adanya penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan TNI sejalan dengan yang dikatakan Rum soal invitasi dari pihak sipil terhadap militer. Hal ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 14/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Pedoman Pengawalan dan Pendampingan Terpadu Penyuluh, Mahasiswa, dan Bintara Pembina Desa Dalam Rangka Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai.

Dalam peraturan tersebut tercantum beberapa tugas TNI dalam membantu petani. *Pertama*, menggerakkan dan memotivasi petani untuk melaksanakan tanam serentak, perbaikan dan pemeliharaan jaringan irigasi, serta gerakan pengendalian hama dan panen. *Kedua*, melaksanakan dukungan dalam keadaan tertentu untuk penyaluran benih, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta infrastruktur jaringan irigasi. *Ketiga*, melaksanakan pengawasan terhadap pemberkasan administrasi, dan penyaluran bantuan kepada penerima manfaat. *Keempat*, melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan identifikasi, pendataan, dan pelaporan teknis pelaksanaan kegiatan.

Keikutsertaan TNI dalam ranah pertanian sudah berlangsung sejak nota kesepahaman ditetapkan per 2014, tak terkecuali di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam wawancara yang dilakukan pada 7 Mei 2018, Suroso, Kepala Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Sleman, mengatakan keberadaan TNI diharapkan mampu memacu petani untuk melakukan percepatan tanam. “Setelah masa panen, petani kerap membiarkan lahan menganggur selama beberapa hari,” terang Suroso.

Selain itu, peran lain yang dijalankan militer adalah memberikan penyuluhan kepada para petani. Menurut Suroso, jumlah penyuluh pertanian masih sangat kurang. Idealnya terdapat satu penyuluh tiap desa. Namun, hal ini tidak dapat diterapkan sebab jumlah penyuluh, baik pegawai negeri sipil (PNS) ataupun tenaga harian lepas tidak memadai. “Contohnya di Sleman, hanya ada 57 penyuluh desa berstatus PNS sedangkan jumlah desa ada 86, sisanya merupakan tenaga kontrak,” terangnya.

Bantuan dari TNI selama ini juga tidak berdampak signifikan kepada masyarakat. BALAIRUNG sempat mewawancarai beberapa buruh tani dan kepala dinas pertanian di sekitar Kabupaten Sleman untuk mengetahui respons masyarakat terhadap peran militer di daerah tersebut. Petani dan buruh tani di daerah tersebut menyatakan tidak terlalu terbantu dengan kehadiran TNI. Hal itu dikarenakan jangkauan TNI pada tatanan pertanian masih sangat terbatas.

Jaiman, salah seorang buruh tani di daerah Madurejo, Sleman, menyebutkan TNI hanya sebatas hadir pada perayaan pasca panen atau ketika panen raya. Budiyanto, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluh Pertanian, Pangan dan Perikanan (BP4) Rejodani, Madurejo, Sleman, membenarkan pernyataan tersebut. “TNI punya peran tapi hanya pada tataran simbolik, contohnya ikut menanam saat membuka masa tanam saja,” jelasnya.

Pernyataan buruh tani dan Kepala BP4 Madurejo yang seakan menihilkan peran TNI berbanding terbalik dengan klaim Menteri Pertanian. Dilansir dari laman pertanian.go.id, Menteri Pertanian menyebutkan bahwa keberhasilan swasembada pangan beberapa tahun terakhir dicapai melalui program Upsus.

Letkol Infanteri Agus Musriyanto selaku Perwira Pembantu Madya Bhakti TNI Staf Teritorial Kodam IV/ Diponegoro sepakat dengan pernyataan Menteri Pertanian. Ia mengatakan, selain tercapainya swasembada, perubahan signifikan yang terjadi akibat adanya kerja sama antara militer dan pertanian adalah kesejahteraan petani menjadi relatif stabil. “Salah satu komitmen dalam kegiatan ini memang meningkatkan kesejahteraan petani,” ucap Agus.

Kedua klaim tersebut kontras dengan data dari *Tempo* yang menyebutkan bahwa Menteri Perdagangan melakukan impor beras sebesar 500 ton pada awal 2018. Lebih lanjut, Subejo, Staf Pengajar Fakultas Pertanian

“TNI sudah punya tugas khusus di bidang pertahanan dan keamanan, mengapa harus repot masuk ke bidang pertanian?”

Universitas Gadjah Mada (UGM), menjelaskan sempat terjadi perselisihan antara Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan mengenai pencapaian swasembada. Sebab, sempat terjadi kelangkaan dan lonjakan harga beras pada awal tahun 2017. “Bila memang benar swasembada, semestinya tidak ada lonjakan harga karena ada persediaan,” papar Subejo.

Keterlibatan TNI yang dirasa terlalu mencampuri urusan pertanian juga turut menjadi perhatian Subejo. Menurutnya, TNI perlu diberikan batasan dalam menjalankan perannya di bidang pertanian. Hal ini dikarenakan militer memiliki sistem kerja instruktif, berbeda dengan sipil yang terbiasa dengan sistem persuasif. Sehingga, dikhawatirkan akan ada unsur pemaksaan yang dilakukan militer kepada petani. “Akan menjadi salah kaprah apabila militer diberi tugas untuk memotivasi petani,” ujar Subejo memberi contoh.

Subejo menegaskan kehadiran TNI sesungguhnya tidak mengubah struktur dan masalah mendasar yang dihadapi petani. Karena permasalahan yang paling penting adalah peningkatan aset produksi, dalam hal ini adalah lahan. “Dengan kepemilikan lahan yang rata-rata hanya 2000 meter, penggunaan peralatan canggih ataupun penanaman tiga kali tidak akan meningkatkan pendapatan petani secara signifikan,” jelasnya. Ia menambahkan, untuk mengatasi permasalahan petani, pemerintah perlu melakukan upaya seperti pemberian zonasi lahan melalui peraturan daerah dan pemberian ganti rugi apabila petani mengalami gagal panen.

Soal kurangnya penyuluh pertanian, Subejo menyebut, hal ini dapat diakali dengan menambah jumlah penyuluh dari sektor pemerintahan, bukan malah dari ranah militer. Selain karena memang pendekatan militer yang cenderung instruktif, Subejo menilai, keterlibatan TNI dalam situasi normal tidak diperlukan. “TNI sudah punya tugas khusus di bidang pertahanan dan keamanan, mengapa harus repot masuk ke bidang pertanian?” ucapnya.

[Hanif, Nabila, Rinaldi]

Judul terinspirasi dari:
Indonesia di Bawah Sepatu Lars: Pembelaan di Muka Pengadilan Mahasiswa Bandung
Oleh Sukmadji Indro Tjahjono.

Menyibak Mitos Keharmonisan Relasi Militer dan Sipil

© Deny/BAL

Dalam menjalin kedekatannya dengan masyarakat, TNI mengupayakan kesigapan dalam mengatasi setiap permasalahan. Namun, nyatanya upaya ini semakin memperlebar kesempatan TNI untuk terlibat aktif di ranah sipil.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai tonggak pertahanan negara mengalami jalan panjang menuju pengukuhannya. Mulai dari Tentara Keamanan Rakyat pada 5 Oktober 1945 hingga Tentara Republik Indonesia pada 26 Januari 1946. Sedangkan, peleburan TNI sejatinya berasal dari tiga organisasi persatuan rakyat yang kelak menjadi unsur utama pembentuknya.

Terdiri dari gabungan tentara bekas Koninklijke Nederlandsch-Indische Leger (KNIL), Pembela Tanah Air (PETA), dan Heiho serta laskar-laskar rakyat lain, TNI berdiri tanggal 3 Juni 1947. Bersamaan dengan itu, TNI Angkatan Darat membentuk struktur komando teritorial sampai ke tingkat terkecil yakni Bintara Pembinaan Desa (Babinsa) yang berada di desa. Perwira Staf Teritorial Kodim 0732/Sleman Kapten Infanteri Nugroho Agung Prasetya mengatakan Babinsa terdiri atas prajurit Batalyon. "Babinsa adalah ujung tombak TNI karena bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujarnya.

Menurut Nugroho, tugas Babinsa adalah membantu tugas Komando Distrik Militer (Kodim) dalam hal kewilayahan. Hal kewilayahan yang dimaksud seperti mengumpulkan data geografi, demografi, dan "penertib" keamanan sosial dengan menanamkan ideologi Pancasila. Sedang dalam hal keamanan,

Babinsa membantu kepolisian mengaktifkan pos ronda serta hansip. Di samping itu, Babinsa bekerja sama dengan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam menertibkan desa. Namun, Nugroho mengatakan bahwa Babinsa tidak hanya bertugas menjaga ketertiban dan keamanan desa, tetapi juga melaksanakan program kerja sama dengan instansi pemerintah terkait.

Sementara itu, ketika menilik dinamika hubungan Babinsa dengan masyarakat Sleman, Serma Hari Priyanto, Babinsa Sidoluhur, Godean, Sleman, mengatakan bahwa relasi yang terjalin antara keduanya tidak pernah menimbulkan konflik. "Babinsa sudah melebur dengan masyarakat karena dari awal kami aktif mengatasi kesulitan mereka," ungkapnya. Sependapat dengan itu, Nugroho menambahkan, memang tujuan meleburnya Babinsa dengan masyarakat adalah mewujudkan konsep *manunggaling*. Makna konsep *manunggaling* yakni menyatu dan terikat secara batiniah dengan masyarakat. Setelah itu, dengan terciptanya *manunggaling* rakyat, TNI akan mudah meminta bantuan logistik ketika terjadi perang dan memobilisasi masyarakat.

Selaras dengan Hari, Rahmawati selaku Lurah Desa Wirokerten, Banguntapan, Bantul, menganggap Babinsa adalah pendamping masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Ketika masyarakat membutuhkan pembinaan untuk mengatasi permasalahan desa, seperti pembangunan kembali rumah penduduk, pemerintah desa akan melapor kepada Babinsa. Kemudian, Babinsa akan terjun langsung untuk menanganinya. Hal ini menimbulkan respons yang baik dari masyarakat. "Ketika Babinsa dimintai bantuan, baik pemikiran hingga tenaga, mereka selalu sigap sehingga hubungan dengan warga harmonis," akunya.

Selain itu, dalam rangka mengedukasi masyarakat, Rahmawati mengaku warga menjadikan Babinsa sebagai narasumber di setiap penyuluhan kemasyarakatan. Melalui Babinsa, menurutnya, pengetahuan laiknya wawasan kebangsaan, penyuluhan kesehatan semacam penyuluhan Keluarga Berencana, hingga urusan pertanian bisa terpenuhi. "Babinsa senantiasa kami libatkan sebagai *stakeholder* agar pemberdayaan masyarakat terwujud," ungkap Rahmawati.

Menanggapi realita dinamika hubungan militer dengan masyarakat, Satrio Dwicahyo, Peneliti Muda pada Program Indonesia, Institut Kajian Pertahanan dan Strategi, RSIS NTU Singapura menampilkan perspektif serupa. Dia menyatakan bahwa militer memang sudah lama menjalin kedekatan dengan masyarakat. Secara historis, saat perang dekolonisasi antara tahun 1945-1949, TNI harus baik kepada masyarakat. Hal ini karena tentara membutuhkan masyarakat untuk memberi peringatan dini jika ada musuh. TNI selalu percaya bahwa rakyat adalah ibu kandung yang melahirkan mereka. "Pemerintah sipil tidak pernah memobilisasi apapun, rakyatlah yang menghimpun badan perlawanan karena kondisi saat itu," jelasnya.

Dr. Najib Azca, dosen Sosiologi FISIPOL UGM sekaligus penulis buku *Hegemoni Militer*, memaparkan konteks historis kedekatan TNI tersebut sebagai upaya hegemoni militer ke ranah sipil. Dia menjelaskan hegemoni TNI sebagai terminologi yang bersifat ekspansif dan interventif sehingga dapat mengancam supremasi sipil dan proses demokratisasi di Indonesia. Hegemoni tersebut makin kuat dengan adanya sistem komando teritorial sebagai rohnya Angkatan Darat. "Lalu, apa fungsi pemerintahan sipil?" tanya Najib secara retoris.

Menanggapi Najib, Satrio mengatakan bahwa angkatan bersenjata merupakan satu-satunya pertahanan yang Indonesia miliki pada awal kemerdekaan. Implikasinya, menurut Satrio, dapat dilihat pada rezim Soekarno. Pada akhir kepemimpinannya, Soekarno melihat militer sebagai salah satu pengelola negara yang memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam pembangunan negara. "Perlu diingat bahwa di banyak negara bekas jajahan, militer adalah organisasi modern pertama yang mereka punya," ujar Satrio.

Tidak hanya itu, pada era Orde Baru, Satrio mengatakan, TNI mengadopsi doktrin Pertahanan dan Keamanan Nasional yaitu Tjatur Dharma Eka Karma (Tjadek) yang memperbolehkan ABRI masuk ke dalam enam lini. Di antaranya adalah pertahanan, keamanan, agen strategis, sosial-politik, teritorial, dan logistik. "Implikasinya, TNI dapat menguasai hampir semua lini terutama di bidang politik dan ekonomi," terangnya. Dia melanjutkan, Soeharto yang notabene seorang perwira tertinggi, memerintah sampai tingkat komando teritorial paling bawah untuk merangsek ke dalam enam lini tersebut.

Sedangkan di sisi lain, Satrio menjelaskan, TNI selalu mempunyai legitimasi historis yang mereka pelihara. Salah satu faktor langgengnya legitimasi tersebut adalah lemahnya organisasi sipil. Penandatanganan nota kesepahaman antara TNI dan Kementerian Pertanian (Kementan) yang melahirkan Upaya Khusus menjadi contoh konkretnya. Nota kesepahaman yang berfungsi untuk meningkatkan swasembada pangan sebagai indikasi Kementan menjadi bias dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat karena mengandalkan bantuan TNI. Hal tersebut turut mendukung TNI dalam memelihara legitimasi historis yang mereka miliki. "Meskipun pada 1998 Orde Baru tumbang, legitimasi ini masih dipelihara karena tidak ada revisi signifikan yang membuatnya lemah," ungkapnya.

Melihat hal ini, Muhammad Rum, Dosen Hubungan Internasional UGM juga memperjelas langgengnya hegemoni TNI disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap konteks demokrasi yang berjalan di Indonesia. Menurutnya, demokrasi secara utuh bukan dilihat hanya pada aspek prosedural, tetapi juga mencakup aspek substantif, seperti supremasi sipil dan profesionalisme militer. Supremasi sipil bertujuan agar militer memiliki etika untuk tunduk kepada sipil. Sedangkan profesionalisme militer dibangun agar militer tidak ikut campur dalam urusan sipil. "Kurangnya pemahaman terhadap implementasi konteks demokrasi menyebabkan masyarakat secara tidak sadar mengundang militer ke ranah sipil," tambahnya.

Mengamini hal tersebut, Satrio mengatakan, keterlibatan Babinsa dalam urusan sipil membuktikan bahwa hegemoni TNI telah menyentuh unit terkecil yakni masyarakat desa. Di samping itu, struktur di sistem komando teritorial yang dipertahankan TNI sampai sekarang kurang efektif. Menurutnya, struktur TNI mulai dari Komando Daerah Militer di tingkat provinsi sampai Babinsa di tingkat desa cenderung melampaui batas. Mengingat, tambahnya, masih belum ada ancaman keamanan darurat yang perlu ditangani. "Jika ancaman keamanan belum jelas, maka hierarki struktur yang dibangun hanya akan melanggengkan kekuasaan TNI di ranah sipil," tuturnya. **[Nabila, Andara]**

Dwifungsi dan Transformasi Bisnis Militer Pascareformasi

© Arjun/BAL

Pencabutan dwifungsi ABRI sebagai tuntutan Reformasi 1998 masih mengalami kebuntuan. Selama bisnis militer masih dipertahankan, tuntutan tersebut tidak akan sepenuhnya terwujud.

Pendahuluan

Tepat pada tanggal 21 Mei 2018, Reformasi 1998 genap berumur 20 tahun. Reformasi 1998 mempunyai enam buah tuntutan yang mencakup bidang pemerintahan, hukum, politik, dan ekonomi. Di antara tuntutan tersebut adalah penghapusan dwifungsi ABRI. Mencabut dwifungsi ABRI berarti menghapuskan fungsi sosial politik yang dimiliki ABRI seperti duduk di kursi pemerintahan, menjadi anggota partai politik, hingga mengelola bisnis pribadi. Dengan begitu, ABRI dapat bekerja dengan lebih profesional. Hal itu diatur dalam UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI yang menetapkan bahwa tentara profesional tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan hanya bertugas untuk menjaga keamanan negara. Namun, penghapusan dwifungsi ABRI sampai saat ini dirasa belum maksimal atau justru cenderung gagal.

Meskipun dwifungsi sudah "dicabut" secara legal, tetapi militer masih mencampuri urusan sipil. Hingga tahun 2018, militer telah memiliki lebih dari 30 nota kesepahaman dengan kementerian dan lembaga negara lainnya yang memungkinkan mereka untuk mengurusi ranah sipil (*Tempo*, 8 Februari 2018). Contohnya adalah kesepahaman dengan Kementrian Pertanian di tahun 2015 agar militer ikut dilibatkan dalam kegiatan pertanian masyarakat di desa-desa. Selain itu, terdapat seorang jenderal aktif yang mencalonkan diri pada Pilkada 2018. Meskipun akhirnya jenderal tersebut kemudian mengundurkan diri dari jabatannya setelah terpilih menjadi calon kepala daerah (*Tempo*, 27 Desember 2017). Tidak hanya itu, ABRI juga masuk

ke ranah pendidikan dengan menyelenggarakan pemutaran film tentang Gerakan 30 September di sekolah-sekolah. Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa ABRI masih tertarik untuk mengurusi hal-hal di ranah sipil.

Adanya keinginan campur tangan militer di ranah sipil dalam hal politik dibenarkan dengan argumen bahwa militer adalah alat pemersatu bangsa (Said, 2016: 28). Slogan "Bersama Rakyat, TNI Kuat" membuktikan kombinasi rakyat dengan militer dianggap penting untuk mencapai tujuan masyarakat sipil seperti stabilitas negara. Maka, usaha yang tepat untuk menjauhkan peran militer pada ranah sipil adalah dengan memperkuat komponen dari sipil dan dapat menjalankan fungsi-fungsinya.

Anggapan di atas tidak sepenuhnya salah, tetapi tidak cukup untuk memahami langgengnya dwifungsi ABRI secara keseluruhan. Pasalnya, klaim seperti itu cenderung menganggap ABRI sebagai institusi apolitis dan mengabaikan kepentingan tertentu yang kemungkinan dimiliki oleh ABRI. Untuk mengetahui apa kepentingan yang dimiliki militer, mengapa mereka mempertahankannya, dan bagaimana caranya, pendekatan ekonomi-politik menjadi pendekatan yang memadai untuk menjawab berbagai persoalan tersebut. Menurut Hadiz & Robison (2013: 41), pendekatan ekonomi-politik berusaha melihat dinamika dan kontestasi antara aktor-aktor dalam menguasai kekuatan ekonomi maupun politik. Dalam perspektif ekonomi-politik, golongan yang telah memiliki kekuasaan dan kepentingan tertentu akan cenderung untuk mempertahankannya. Namun, cara untuk mempertahankan kekuasaan itu bergantung pada kondisi masyarakat yang ada.

Berubahnya kondisi sosial masyarakat mengharuskan mereka yang memiliki kepentingan tertentu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Menurut Hadiz & Robison (2013), kekuatan ekonomi-politik yang terbentuk ketika Orde Baru menggantungkan kepentingan dan kekuasaan mereka kepada hubungan langsung terhadap negara. Pengusaha-pengusaha yang berkembang saat itu merupakan kroni-kroni Orde Baru yang mendapatkan perlindungan dari negara, terutama dari keluarga Soeharto. Berkat perlindungan ini, para pengusaha-pengusaha itu dapat menancapkan kepentingan mereka ke sektor-sektor ekonomi tertentu dalam masyarakat dan membesarkan kekuasaan mereka (Hadiz & Robison, 2013: 46). Jatuhnya Soeharto dan berubahnya sistem pemerintahan menjadi lebih demokratis menyebabkan hilangnya perlindungan yang diberikan oleh negara kepada mereka. Perubahan ini memaksa bekas kroni-kroni Orde Baru tersebut untuk menyesuaikan terhadap iklim demokrasi di masyarakat sejak reformasi (Hadiz & Robison, 2013: 54). Di era reformasi ini, kekuasaan mereka menjadi tergantung pada institusi demokrasi dan legitimasi masyarakat secara langsung.

Melihat hal tersebut, bertahannya dwifungsi ABRI sampai saat ini dapat dilihat melalui kacamata yang sama. Dengan kacamata ini, dwifungsi ABRI saat ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan kepentingan yang dimiliki oleh ABRI. Sama seperti kroni-kroni Soeharto, ABRI ketika Orde Baru mendapatkan legitimasi langsung dari negara untuk menguasai ranah ekonomi dan politik. Di era reformasi, tidak adanya legitimasi dari negara membuat ABRI harus memperkuat legitimasinya pada masyarakat sehingga mampu melindungi kekuasaan dan kepentingannya secara demokratis. Maka dari itu, penting untuk melacak titik kemunculan kepentingan ekonomi dan politik militer serta sistem dwifungsi.

"Di era reformasi, tidak adanya legitimasi dari negara membuat militer harus memperkuat legitimasinya pada masyarakat sehingga mampu melindungi kekuasaan dan kepentingannya secara demokratis."

Dalam sejarahnya, bermulanya campur tangan ABRI di ranah sipil merupakan akibat dari perkembangan institusi ABRI di Indonesia itu sendiri.

Dwifungsi ABRI dalam Lintasan Sejarah Indonesia

Pada masa Revolusi 1945-1950, militer kala itu harus mengurusi dirinya sendiri karena pemerintah pusat tidak berperan langsung dalam pembentukannya. Militer di Indonesia tidak didirikan oleh pemerintah sipil melainkan sebuah *self-created army* yang dibuat oleh anggota-anggotanya sendiri (Said, 1987). ABRI Indonesia dibangun oleh pasukan-pasukan bekas Pembela Tanah Air (PETA) dan Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger (KNIL) secara mandiri di saat pemerintah sipil mengutamakan diplomasi dibandingkan perang terhadap Belanda. Hal ini membuat ABRI memiliki otonomi lebih dari pemerintah sipil dalam mengurusi dirinya sendiri. Akibatnya, ABRI cenderung memiliki kepentingan dan orientasi yang berbeda dari pemerintah sipil.

Selain kurangnya andil pemerintah, konteks perang gerilya juga menjadi momen penting dalam membentuk kekuatan dan peran politik militer di Indonesia. Kekuatan politik militer terbentuk melalui struktur komando teritorial yang memiliki tingkatan setara dengan pemerintah sipil dari tingkat kabupaten hingga desa (Said, 1987). Struktur komando ini berfungsi untuk menggantikan pemerintahan sipil ketika keadaan darurat muncul demi mengontrol dan mengorganisir masyarakat untuk perang. Contohnya pada saat Agresi Militer Belanda tahun 1948 ketika ibukota Yogyakarta direbut oleh Belanda. Kejatuhan pemerintah pusat membuat ABRI menjadi satu-satunya otoritas pemerintahan yang ada. ABRI kemudian turun ke daerah pedalaman, dan mengorganisir warga untuk perang gerilya melawan Belanda. Struktur komando teritorial bentukan ABRI membuatnya dengan mudah dapat menggantikan posisi dan peran pemerintah. Dibantu oleh Undang-Undang Darurat Perang, militer dapat mengambil alih seluruh wilayah Republik yang

membuatnya tidak hanya menguasai wilayah Indonesia secara keseluruhan, tetapi juga semua bidang yang ada di dalamnya, salah satunya bidang ekonomi (Crouch, 2007).

Keterlibatan ABRI di dalam bidang ekonomi disebabkan oleh kurangnya dana dari pemerintah untuk membiayai kepentingan militer maupun kepentingan pribadi anggotanya. Kekurangan dana dalam tubuh ABRI memaksa mereka untuk mencari sokongan dana sendiri. Misalnya, militer dapat mencari dana dengan membantu melakukan penyelundupan, membuat perjanjian dengan pengusaha setempat, menarik pajak daerah, dan membantu mengecek surat-surat perizinan serta fasilitas-fasilitas lainnya (Crouch, 2007: 38; Mietzner & Misol, 2013: 104). Keterlibatannya dalam ekonomi berkembang lagi ketika ABRI menguasai perusahaan-perusahaan Belanda. Dengan dalih UU Darurat, militer mengambil alih perusahaan-perusahaan milik Belanda yang telah dinasionalisasi oleh negara di tahun 1957. Berkat itu, militer menduduki posisi-posisi strategis pada perusahaan-perusahaan perkebunan, pertambangan, bank, dagang, dsb (Crouch, 2007: 39; Mietzner & Misol, 2013: 105). Namun, perusahaan-perusahaan yang dijalankan ABRI ini justru menimbulkan salah urus dan korupsi. Tentara yang menduduki posisi di perusahaan-perusahaan tersebut secara ilegal menyalurkan dana dan pemasukan perusahaan ke tubuh militer ketimbang kembali ke negara.

Kejatuhan pemerintahan Soekarno dan peralihan ke rezim Orde Baru memperkuat kekuatan politik ABRI. Legitimasi dwifungsi ABRI oleh Orde Baru membuat ABRI menjadi lebih leluasa dalam mencampuri politik. Konsep Dwifungsi ABRI di era Orde Baru memiliki perbedaan dari konsep "Jalan Tengah" yang diciptakan oleh A. H. Nasution. Konsep "Jalan Tengah" ditujukan agar militer dapat memanfaatkan fungsi non-militernya untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan politik tetapi tidak mendominasi sebagaimana konsep "Dwifungsi ABRI" (Said, 1987: 24-29). Bentuk-bentuk politik yang dilakukan oleh ABRI di era Soeharto misalnya memperkuat struktur komando teritorial dari tingkat nasional hingga pedesaan. Tujuannya agar ABRI dapat lebih leluasa menguasai dan mengurusi ranah sipil. Sementara itu, anggota ABRI ditempatkan pada posisi-posisi strategis dalam pemerintahan seperti menjabat sebagai anggota MPR dan kepala daerah. Pada tahun 1971, total gubernur yang berasal dari kalangan sipil hanya berjumlah 4 dari 26 orang (Crouch, 2007: 244).

Tidak hanya itu, legitimasi dwifungsi ABRI juga membuat kepentingan ekonomi ABRI semakin luas dan mengakar. Militer menjadi komponen penting dalam urusan perekonomian negara karena dianggap dapat melaksanakan tujuan negara yaitu "stabilisasi" dan "pembangunan" (Crouch, 2007: 273). Beberapa anggota ABRI ditempatkan pada sektor-sektor perekonomian untuk menaikkan pemasukan militer. Di era Orde Baru, militer mendapatkan keuntungan dan konsensi bisnis yang besar dari pemerintah (Crouch, 2007 : 280-283). Misalnya, ABRI dilibatkan dalam kerja sama pemerintah dengan pengusaha Tionghoa, Jepang, dan Amerika. Mereka juga menguasai tiga perusahaan yang dianggap vital bagi ekonomi pada akhir tahun 60-an, yaitu Pertamina, Bulog, dan PT. Tri Usaha Bakti. PT. Tri Usaha Bakti adalah sebuah grup bisnis besar yang beranggotakan perusahaan beras, perbankan, maskapai penerbagan, dan usaha-usaha yang menyangkut kebutuhan primer masyarakat. Banyak pula perusahaan berlatar belakang militer yang tumbuh seperti Yayasan Dharma Putra Kostrad milik Soeharto yang menjalin kerja sama dengan pengusaha Tionghoa Liem Siu Liong.

Bisnis Militer Pasca-reformasi

Reformasi pada tahun 1998, yang berujung pada kejatuhan Soeharto, menjadi titik balik bagi penguasaan ABRI atas ranah sipil. Pencabutan Dwifungsi ABRI menjadi wacana yang didengungkan sebagai salah satu tuntutan reformasi. Pada tahun 2004, pemerintah menerbitkan UU No. 34 tahun 2004 tentang Militer yang mencabut dwifungsi ABRI (Mietzner & Misol, 2013: 112). Oleh karena itu, ABRI kehilangan fungsi sosial-politiknya. Mereka tidak lagi dapat merangkap menjadi pejabat ataupun menguasai suatu bisnis secara langsung. Struktur ABRI pun dirombak menjadi dua yaitu Polisi yang bertugas menjaga keamanan dan TNI yang menjaga pertahanan negara. Pemisahan tersebut secara langsung membuat ABRI tidak lagi diperbolehkan mencampuri urusan sipil.

Walaupun begitu, kepentingan ABRI pada bidang ekonomi dan politik tidak serta merta ikut terhapus. Seperti halnya dengan kepentingan yang dimiliki oleh kroni-kroni Orde Baru, mengakarnya kepentingan ekonomi-politik militer sejak era Orde Baru membuatnya sulit untuk dihapuskan (Hadiz & Robison, 2013). Sementara itu, perubahan hukum yang terjadi sejak Reformasi hanya mengubah dinamika kekuasaan ekonomi dan politik yang dilakukan oleh ABRI. Sebelum Reformasi 1998, negara memberikan legitimasi penuh terhadap dwifungsi ABRI sehingga mereka mampu berkuasa secara terbuka. Namun saat ini, penghapusan dwifungsi secara legal membuat militer harus menggunakan cara lain untuk tetap mempertahankan kepentingannya.

> "Penghapusan dwifungsi secara legal membuat militer harus menggunakan cara lain untuk tetap mempertahankan kepentingannya."

Menurut laporan Indonesian Corruption Watch (2003), militer kini masih berbisnis melalui tiga cara yaitu bisnis informal, bisnis ilegal, serta koperasi atau yayasan. Bisnis informal dalam bentuk penempatan personel TNI ke perusahaan juga melibatkan TNI sebagai institusi, kesatuan maupun anggota TNI. Bisnis ilegal hanya melibatkan individu dan kesatuan, secara institusi TNI tidak melakukannya. Sangat disayangkan, ketika UU No. 34 tahun 2004 tidak membedakan antara bisnis ilegal dan formal. Pemerintah seakan-akan lepas tangan, karena menganggap jenis bisnis ilegal dan formal tidak sesuai dengan definisi reformasi militer. Sementara itu, bisnis formal dalam bentuk yayasan dan koperasi melibatkan institusi TNI, kesatuan seperti Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan individu.

Yayasan dan koperasi sendiri dikategorikan sebagai "kepemilikan tidak langsung" sehingga cukup

direstrukturisasi dan tidak diambil alih oleh negara (Mietzner & Misol, 2013 : 114). Sementara itu, bisnis yang dimiliki oleh ABRI secara langsung perlu diserahkan kepada negara. Akan tetapi, TNI menyatakan bahwa tidak terdapat kepemilikan bisnis secara langsung. Nampaknya, bisnis yang terdaftar pada tahun 2008 dimasukkan ke dalam struktur baru perusahaan yang dijalankan secara legal oleh koperasi. Perubahan ini tercermin dalam peningkatan unit "bisnis' pada tahun 2011 dengan 1.301 koperasi dan lebih dari 13 yayasan.

Menurut laporan Human Rights Watch (2006), yayasan dan koperasi tetap dipertahankan oleh militer karena kurangnya anggaran dari pemerintah untuk memenuhi kesejahteraan prajurit. Rendahnya anggaran menyebabkan gaji prajurit menjadi sangat rendah dan hanya cukup untuk memenuhi setengah dari biaya minimum yang dibutuhkan ABRI. Akibatnya, ABRI merasa perlu untuk melakukan kegiatan perekonomian. Menteri Pertahanan, Juwono Sudarsono, menyatakan pada tahun 2007, "Anggaran operasi pemerintah untuk TNI masih sangat rendah, jadi untuk belanja operasi pertahanan dan keamanan, institusi militer harus mendanai sendiri dengan aktivitas bisnis" (Human Rights Watch, 2010 : 6).

Akan tetapi, berdasarkan pemeriksaan keuangan BPK banyak bisnis TNI yang nyaris tidak menyumbang apapun setelah puluhan tahun penyelewengan dan korupsi (Human Rights Watch, 2010). Yayasan dan koperasi militer dikisar memiliki aset kotor sebesar Rp 3.2 trilyun dan aset bersih Rp 2.2 trilyun pada akhir tahun 2007. Aktivitas bisnis ini meraup laba Rp 268 miliar pada tahun yang sama. Ini belum termasuk upah jasa keamanan, sewa tanah dan bangunan, beking perusahaan yang terlibat kriminalitas dan korupsi. Namun, bisnis-bisnis tersebut cenderung tidak digunakan untuk kesejahteraan prajurit. Laporan Human Rights Watch (2006) menyatakan bahwa bisnis militer menjadi sumber keuangan bagi jenderal dan tidak menaikkan taraf hidup prajurit di daerah. Artinya, alasan yang mendukung keberadaan bisnis ABRI tidak dapat dibenarkan. Alih-alih menyejahterakan prajurit, bisnis militer hanya menjadi bagian dari kepentingan elit ABRI.

Penutup

Walaupun reformasi sudah berumur 20 tahun, militer masih saja mencampuri urusan-urusan sipil. Militer masih hadir di ranah sipil dengan bentuk-bentuk yang mampu diterima dengan baik oleh masyarakat. Mereka masuk dengan mencitrakan dirinya melalui berbagai macam wacana, kegiatan, dan slogan-slogan bahwa mereka akan bekerja bersama rakyat untuk mewujudkan tujuan negara. Struktur komando teritorial yang masih dipelihara memudahkan militer untuk terlibat langsung dalam tiap permasalahan sipil. Banyak juga jenderal-jenderal yang rela melepaskan jabatannya, tidak hanya untuk duduk di kursi pemerintahan, namun juga untuk ikut terlibat dalam kegiatan di perusahaan-perusahaan swasta. Misalnya, militer ikut terlibat dalam masalah sengketa lahan antara perusahaan-perusahaan tambang dan perkebunan di Kalimantan Selatan (*Majalah Tempo*, 9 April 2018).

Melalui kacamata ekonomi-politik, upaya ABRI untuk mencampuri ranah sipil harus dilihat sebagai upaya untuk mempertahankan kepentingan bisnis mereka. Hingga saat ini pun, ABRI masih memiliki kepentingan bisnis yang cukup besar. Bisnis yang dimiliki oleh ABRI seakan menjadi pendorong bagi mereka untuk berusaha menguasai ranah politik dan sipil. Melalui dwifungsi ABRI yang mendapat legitimasi oleh pemerintahan Orde Baru, ABRI dapat menancapkan dan mengembangkan kepentingan bisnis dan politiknya. Walaupun pemerintah sejak kejatuhan Soeharto sudah tidak melegitimasi dwifungsi ABRI, ABRI tetap mencoba melakukan langkah-langkah politik agar tetap bisa menguasai masyarakat. Hal ini penting karena dengan mendapatkan legitimasi dari masyarakat, ABRI lebih leluasa untuk bergerak. Kemampuan militer untuk mencampuri urusan sipil hingga saat ini membuktikan bahwa pencabutan dwifungsi ABRI yang merupakan tuntutan Reformasi 1998 mengalami kegagalan. Tulisan ini menunjukkan bahwa selama kepentingan ekonomi ABRI masih bertahan, tuntutan tersebut akan sulit dicapai.

[Matthew, Olivia]

Daftar Pustaka

Crouch, H. (2007). *The Army and Politics in Indonesia*. Singapore: Equinox.
Hadiz, V. R., & Robison, R. (2013). The political economy of oligarchy and the reorganization of power in Indonesia. *Indonesia*. 96(1): 35-57.
Mietzner, M., & Misol, L. (2013). "Military Businesses in Post-Suharto Indonesia: Decline, Reform and Persistence.
Dalam Rüland, J. , Manea, M. G. , and Born H (eds) *The Politics of Military Reform: Experiences from Indonesia and Nigeria*. Heidelberg: Springer.
Human Rights Watch (2006) *Harga Selangit: Hak Asasi Manusia sebagai Ongkos Kegiatan Ekonomi Pihak Militer Indonesia*. New York: Human Rights Watch.
Human Rights Watch (2010) *"Janji Tak Ditepati" Kegagalan Mengakhiri Bisnis Militer di Indonesia*. New York: Human Rights Watch.
Indonesian Corruption Watch (2003). *Bisnis Militer Mencari Legitimasi*. Jakarta.
Majalah Tempo (9 April 2018) *Perang Bintang, Sengketa Tambang.*
Said, S. (1987). The political role of the Indonesian military: past, present and future. *Asian Journal of Social Science*. 15(1): 16-34.
Tempo (27 Desember 2017) *Pilkada 2018, Lima Jenderal Siap Maju Jadi Calon Gubernur.*
Tempo (8 Februari 2018) *DPR Tinjau Ulang Semua Nota Kesepahaman TNI.*

Quo Vadis Reformasi?

Rindu Kami pada Ketegasan yang Korup, Keteraturan yang Absurd

Geger Riyanto

Entah sejak kapan pastinya ini berlangsung. Reformasi, yang pasti, tengah bergerak mundur. Dan kini kita seakan sudah nyaris kembali ke titik nol. Demokrasi, yang menjadi mantra pada dasawarsa 90-an, seakan setiap perkara kehidupan selesai selepas ia dilaksanakan, dibajak dengan teknik-teknik manipulasi elektoral baru para pengepul modal. Provokasi vulgar sentimen religius, sebut saja. Pengembangbiakan citra-citra populer banal. Peniupan-peniupan berita palsu. Program-program politik instan.

Hak-hak kewargaan kelompok minoritas, kita tahu, kian tercekik oleh fantasi mayoritas yang terzalimi yang diembuskan terus-menerus. Penumpukan kekayaan, kendati tak sevulgar yang terjadi pada kurun Orde Baru, tak dengan sendirinya lebih baik. Dan di balik partai dan pejabat, yang dipilih semata karena citra nasionalistis, islami, atau, kini, “milenialnya”, nama-nama taipan tetap saja bergentayangan.

Tetapi, saya kira, ada satu kemandekan gawat yang tak selalu mudah terjumpai. Militer, yang disekat jauh-jauh dari ranah politik, untuk alasan yang bijak sebenarnya, lambat-laun memperoleh jalannya untuk kembali ke kekuasaan.

Saya masih ingat, pada hari itu, Minggu, 17 September 2017, ribuan massa yang mengepung kami di Lembaga Bantuan Hukum tak sekadar menampakkan kebuasannya ingin menggerebek PKI—yang tak pernah ada di antara kami, tentu. Di antara umpatan-umpatan religius sekaligus keji yang tak kunjung henti membakar emosi massa, puja-puja terhadap tentara terus-menerus mengumandang. Massa, yang terhimpun dari berbagai ormas dan kalangan, tak jemu-jemu mengelu-elukan, “Hidup TNI! Hidup TNI!”

Elu-elu yang membahana hari itu, kendati cukup menyentak, di satu sisi masih terpahami. Sejak waktu yang lama, patron dari ormas-ormas di Indonesia tak lain dari tentara. Dari tentara, kesempatan-kesempatan menggiurkan mengucur—merentang dari tawaran menjadi penjaga keamanan hingga menjadi penjagal. Dari menggugu tentara pula, wibawa—atau tepatnya kegarangan—ormas tegak. Selain jubah, kita tahu, seragam ormas adalah seragam tentara. Pun, tak sedikit dari antara para anggotanya yang bergabung hanya karena dapat ingin mengenakan seragamnya.

Kendati demikian, elu-elu tersebut juga menunjukkan kembalinya satu kesadaran yang sejatinya tak kita inginkan. Kesadaran bahwa kepemimpinan militeristis mutlak diperlukan untuk membimbing kembali Indonesia ke kodrat berjayanya. Setelah hari Minggu yang menyiksa di LBH tersebut berlalu, akun-akun media sosial segera meriuhkan jagat maya dengan dakwaan rezim pemerintahan melindungi PKI. Tak lupa, akun-akun tersebut pun mengimbuhkan pesan yang mengelu-elukan tentara. Tentara adalah penjaga bangsa dari ancaman komunisme, cuit mereka. Tentara adalah pemimpin tegas yang dibutuhkan negara ini. Bersama tentara, negara ini aman dari gangguan-gangguan.

Sebuah kebetulan? Bukan. Hari-hari ini, pola semacam rutin berulang. Cermati saja, katakanlah, apa yang menyeruak di antara publik kita sesegera sebuah kekisruhan meruyak. Idiom Petrus, pada waktu-waktu seperti itu, acap berseliweran. Khalayak sekonyong-konyong saja merindukan penembak misterius yang menghabisi ancaman-ancaman dengan cara apa pun. Komando militer yang dingin, efisien, dan menegakkan keamanan tanpa memedulikan label kejam serta-merta menjadi begitu heroik.

Belum lagi fetisme-fetisme semacam yang diidap seorang Ahmad Dhani yang, kita tahu, juga diidap banyak orang. Dhani tak pernah menutup-nutupi obsesinya dengan militer. Kendati lebih menyerupai preman ormas di pasar, ia gemar tampil dengan atribut seperti baret, seragam loreng-loreng, lencana dan pangkat. Dan kendati ia seharusnya tahu tindakannya konyol, ia tak tedeng aling-aling mengenakan seragam pemimpin Nazi, Heinrich Himmler, dalam sebuah kampanye publik.

Pertanyaan awamnya, boleh jadi, apa salahnya membuka kembali ruang-ruang di mana militer dapat berperan penting dalam kehidupan sipil? Bukankah bila memang kepemimpinan militeristis yang tegas sanggup membangun Indonesia, kepatuhan menjadi harga yang tak terlalu mahal untuk membayarnya?

Saya yakin, kepercayaan ini bukan hanya terlalu optimistis. Ia juga mengawang dan fatal dalam kemengawangannya. Pertama-tama, pada kurun Orde Baru, jabatan-jabatan publik secara telanjang dikuasai oleh militer atau pensiunannya. Dalam data yang dihimpun John A. MacDougall untuk "*Indonesia Reports*", Maret 1986, separuh dari 145 jabatan tertinggi di pemerintahan Indonesia dipegang oleh militer. Presiden kita itu, tentu saja, pensiunan bintang empat. Tujuh dari delapan penasihatnya berlatar belakang militer. Dua dari tiga menteri koordinator merupakan militer.

Di instansi yang dianggap strategis, cengkeraman militer bahkan jauh lebih menyeluruh. Seluruh pejabat dari tingkatan menteri hingga direktorat jenderal di Kementerian Pertahanan dan Keamanan berasal tak lain dari militer. Di Departemen Dalam Negeri, sementara itu, 89 persen dari pejabat tingginya adalah militer.

Seandainya benar ketegasan mereka "membangun", kita seharusnya sudah hidup di sebuah negeri angan-angan di mana kita tak usah memikirkan lagi keruwetan birokrasi dan, lebih-lebih, korupsi. Militer bukan hanya punya kesempatan puluhan tahun untuk menata birokrasi. Ia juga punya kekuasaan nan penuh. Namun, kita sudah tahu apa yang terjadi selanjutnya. Berurusan dengan birokrasi adalah berurusan dengan kepelikan demi kepelikan tak beralasan. Dan bagi sebagian besar warga maupun pegawai negeri, urusan dengan pejabat birokrasi adalah urusan yang—lebih dari apa pun—menuntut kepatuhan buta.

Apa yang terjadi dengan ketegasan yang didamba-dambakan itu kala dia tidak terawasi? Yang terjadi adalah, ia menjadi ketegasan yang menegakkan otoritas pejabat-pejabat teratas belaka. Aturan-aturan absurd mesti dijalankan semata untuk menunjukkan kepatuhan subjek yang dikuasai kepada kekuasaan. Dan, percayalah, ini tak hanya terjadi di Indonesia. Dokumentasi-dokumentasi etnografis yang dihimpun antropolog David Graeber, toh, memperlihatkan, tatanan birokrasi yang disangga oleh kekerasan cenderung memuat aturan-aturan yang konyol. Birokrasi, pasalnya, menjadi ritual ketaatan pada lingkungan-lingkungan otoriter.

Dan saya belum beralih ke bahaya yang lebih menggentarkan dari keterlibatan militer dalam politik. Penyalahgunaan aparatus-aparatus militer, percayalah, sangat rentan terjadi dalam momen-momen kontestasi kekuasaan. Siapa yang dapat menjamin seandainya seseorang dengan jabatan tinggi dalam ketentaraan tidak akan menggunakan operasi-operasi intelijen untuk memenangkan pihaknya atau membungkam lawan politiknya? Tidak ada.

Faktanya, ia pernah berlangsung dan tidak sekadar untuk dua atau tiga tahun. Untuk memenangkan Soeharto dalam pemilu 1971, Ali Moertopo mengerahkan preman-preman binaannya untuk memantik kerusuhan di mana-mana, menunjukkan bahwa rakyat perlu memilih partai yang dapat menjamin keamanan. Untuk mengamankan Soeharto yang mulai terancam momentum Reformasi, Prabowo Subianto—ya, benar, calon presiden kita itu—menyebarkan kabar-kabar palsu kepada para pemimpin Islam. Dari momen kenaikan sampai dengan pelengserannya, yang tak kurang dari tiga dasawarsa, Suharto mempertontonkan kepada kita apa yang terjadi ketika seorang penguasa memiliki aparatus militer untuk menyangga rezimnya.

Akibatnya, buruk. Dan kita memilih untuk melupakannya.

Keterlibatan militer dalam bisnis pun tak kurang mengerikannya. Bayangkan saja ketika logika bisnis, yang menghalalkan apa pun untuk mengepul uang, bertemu dengan logika pemegang senjata. Apa lagi yang akan muncul kalau bukan satu aliansi yang mematikan? Perusahaan-perusahaan, sebut saja perusahaan kayu Bob Hasan atau Freeport, dapat beroperasi tanpa perlu memedulikan kehancuran yang disebabkannya. Setiap perlawanan kelompok yang paling dirugikan dapat ditumpas habis dan perusahaan dapat mengeruk keuntungan sekenyangnya.

Dan hari-hari ini, percayalah, ia masih terjadi. Apa yang memungkinkan ekspansi perkebunan sawit berlangsung besar-besaran tanpa perlawanan berarti kendati ada masyarakat yang lahannya diserobot, tak bersetuju, atau dikecoh perjanjian culas? Kita tak bisa naif menghadapi pertanyaan ini. Militer masih secara terang-terangan diberdayakan dalam membantu pembukaan-pembukaan lahan untuk kepentingan bisnis.

Dan satu pertanyaan lagi yang juga tak bisa kita tanggapi dengan naif. Mengapa jabatan komisaris perusahaan-perusahaan besar masih diduduki sosok-sosok berlatar belakang militer? Jawaban sederhana, yang sayangnya sering dilupakan, adalah, mereka masih dianggap dapat menjamin bisnis berjalan lancar. Mereka dianggap punya jaringan, kemampuan, pengaruh untuk memastikan gangguan-gangguan terhadap perusahaan dapat dipatahkan.

Lantas, adalah hal yang lucu mendapati kita kini mendamba-dambakan militer kembali menggenggam kekuasaan penuh atas kehidupan warga Indonesia. Militer identik dengan ketegasan? Tentu saja—ketegasan yang memastikan kekuasaan mereka tak terganggu. Militer identik dengan keteraturan? Tentu—keteraturan di mana orang-orang patuh kepada mereka tak peduli betapa nestapanya orang-orang ini. Militer identik dengan efektivitas? Ya—efektivitas yang menjamin bisnis tak perlu memikirkan apa-apa selain meraup keuntungan sebanyak-banyaknya.

Dua puluh tahun Reformasi bergulir. Derap langkah mundur kita acap konyol dan menggelikan. Namun, yang satu ini bukan hanya konyol dan menggelikan. Ia juga mengerikan.

Geger Riyanto adalah seorang Mahasiswa Ph.D. bidang Etnologi, Universitas Heidelberg, Jerman. Ia aktif berkegiatan di Koperasi Riset Purusha dan Penerbit Kepik. Dia juga sering menulis esai.

© Upavasa/BAL

Pandangan ke Arah Pancasila yang Radikal

Ibnu Malik
Mahasiswa Universitas Gadjah Mada

Dalam memandang persoalan-persoalan bangsa, kerap kali ahli filsafat dan intelektual Indonesia menggunakan pendekatan noarmatif-etis. Pancasila, sebagai ideologi negara, juga dirumuskan sebagai suatu kerangka etika yang mengatur hidup masyarakat. Contohnya adalah karya-karya pemikir Pancasila, seperti Sri Soeprapto, Kaelan, dan Yudi Latif. Soeprapto (2013) misalnya, menyatakan bahwa permasalahan pelaksanaan Pancasila yang penting diperhatikan adalah merumuskan Pancasila sebagai norma etis kehidupan yang ditujukan sebagai dasar membina martabat warga Indonesia. Latif (2013) menyatakan bahwa untuk menciptakan negara yang baik, penyelenggara negara dan warga negara perlu menjalankan etika politik sesuai dengan nilai-nilai dasar yang disepakati sebagai titik temu dan panduan bangsa yang bersangkutan. Kaelan (2017), sependapat dengan Soeprapto dan Latif, memaparkan bahwa Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, moral maupun kenegaraan.

Konsekuensi dari pandangan di atas ialah bahwa Pancasila digagas sebagai suatu proyek etis, alih-alih proyek politik. Sehingga, dapat dipahami mengapa pelaksanaan (atau penguatan) Pancasila dilakukan dengan cara inovasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, penyuluhan etika politik pada aparatur negara, atau penguatan nilai-nilai Pancasila melalui bangku pendidikan. Sebab, Pancasila dipandang sebagai suatu landasan etis yang bisa menuntun perilaku masyarakat Indonesia. Jadi, masyarakat yang diubah melalui Pancasila, bukan masyarakat yang mewujudkan Pancasila.

Interpretasi Pancasila secara normatif-etis seperti ini, menurut saya mempunyai rumusan masalah yang kira-kira mirip seperti yang dikemukakan oleh Rocky Gerung (2008: ix). Rocky, seperti dikutip okeh Martin Suryajaya (2014), mengatakan bahwa problem dasar dari filsafat politik ialah mengenai "normativitas masyarakat politik" yang di dalamnya menyangkut perihal "kondisi sosio-psikologis" dan "hakikat manusia" yang diperlukan bagi terbentuknya suatu masyarakat politik. Hal ini persis seperti yang dilakukan Notonagoro, yang digadang-gadang sebagai filsuf Pancasila, dalam usahanya membuat Pancasila sebagai suatu filsafat. Misal, dengan mengajukan pertanyaan mengenai "hakikat manusia" Indonesia yang berpancasila, Notonagoro menginterpretasi kesatuan lima sila mengenai bagaimana seharusnya manusia Indonesia yang Pancasilais itu.

Dalam kesempatan ini saya akan mengajukan kritik terhadap interpretasi normatif-etis atas Pancasila seperti dijabarkan dengan pandangan metapolitik Alain Badiou. Secara singkat, Badiou menolak segala bentuk "asumsi moralis humanis dalam politik" (Suryajaya, 2014: 82). Ia membedakan antara metapolitik dan filsafat politik. Menurut Badiou (2006) dalam Suryajaya (2014: 82), filsafat politik adalah memahami politik dari sudut pandang di luar politik. Sedangkan metapolitik secara metodologis menentukan kriterianya "dalam praksis politik itu sendiri" (Suryajaya, 2014: 83). Mendekati politik secara imanen, atau dalam dirinya sendiri, "mengandaikan keterlibatan aktif dalam proses politik emansipatoris" (Suryajaya, 2014: 86).

Menurut Suryajaya (2014: 84), kriteria yang bisa ditetapkan adalah "ada/tidaknya tesis politik baru yang diartikulasikan oleh peristiwa itu". Suatu tesis politik baru yang muncul dapat dikatakan emansipatoris apabila ia "menandai sebuah patahan (rupture)" dari rezim yang lama (Suryajaya, 2014: 84). Selain itu, bagi Badiou, "tak ada posisi ekstra-politik yang memungkinkan kita berbicara tentang keseluruhan proses politik secara objektif dan menyeluruh", karena "kebenaran selalu ditentukan secara intra-politis dan muncul dari keterlibatan aktif yang senantiasa subjektif, atau dalam kata lain, berpihak" (Suryajaya, 2014: 88).

Kemudian, Badiou merumuskan watak aksiomatik dari politik. Maksud dari aksioma atau postulat ialah titik tolak deduksi logis yang diandaikan ada agar kita mampu berpikir tentang apa yang dapat ditariksebagai konsekuensi darinya (Suryajaya, 2014: 88). Namun, aksioma politik bukanlah suatu hukum yang transendental dan bisa berlaku sepanjang zaman, melainkan dipostulasikan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam proses politik. Suryajaya (2014: 90) menjelaskan, "Politik aksiomatik tidak berangkat dari pengakuan atas kondisi kekurangan ("kita tidak setara") ke suatu kepenuhan idealnya, melainkan berangkat dari suatu prakondisi subjektif-aksiomatik yang positif ("kita setara"), melalui analisis aZtas kondisi objektif yang negatif ("dalam kondisi ini, kita tidak setara"), untuk memperjuangkan kondisi objektif yang positif ("dalam kondisi ini, kita setara")."

Dari penjabaran di atas, kita bisa melihat bahwa Pancasila tidak bisa dipandang secara etis-normatif. Pemikiran-pemikiran intelektual yang menjabarkan Pancasila secara normatif-etis justru membelenggu kekuatan radikal Pancasila. Jika dipahami dalam kerangka Badiouian, Pancasila adalah suatu peristiwa yang menandai suatu patahan (rupture) dari keadaan kolonial menuju Indonesia merdeka. Pancasila menjadi suatu tesis politik baru dari kekuasaan sebelumnya. Ia adalah suatu "persetujuan", seperti dikatakan Soekarno. Suatu persetujuan politik yang dicari bersama-sama untuk diwujudkan bersama-sama pula.

Adalah benar jika Soekarno menyatakan bahwa Pancasila ialah philosophische grondslag dan Weltanschauung yang menjadi dasar bagi kemerdekaan dan terbentuknya Negara Kedaulatan Republik Indonesia. Namun, bukan berarti philosophische grondslag dan Weltanschauung tersebut mesti dipahami sebagai ethische grondslag atau die Ethik, meski filsafat mau tidak mau memang berhubungan dengan etika. Hanya saja, Pancasila akan lebih berarti jika dipahami sebagai suatu aksioma politik. Sebab, bila ditafsirkan menjadi etika politik, Pancasila justru kehilangan daya dobrak radikalnya sebagai tesis baru politik.

Bagi saya, Pancasila dapat dipahami adalah suatu aksioma yang dirumuskan bersama dari kesepakatan antaraktor yang terlibat dalam proses politik. Pancasila berangkat dengan politik deklaratif. Kemudian, melakukan analisis terhadap kondisi objektif. Lalu, mengupayakan kondisi objektif tersebut untuk berubah. Maka, Pancasila adalah suatu aksioma yang mesti diperjuangkan terus menerus oleh rakyat Indonesia dan bukan menjadi suatu ideal yang tidak berarti apa-apa. Mengutip Soekarno, "Kalau benar semua hal ini harus diselesaikan lebih dulu, sampai njelimet, maka saya tidak akan mengalami Indonesia Merdeka, tuan tidak akan mengalami Indonesia merdeka, kita semuanya tidak akan mengalami Indonesia merdeka, sampai di lobang kubur!"

Kalimat tersebut menegaskan bahwa Pancasila sebagai dasar Indonesia merdeka adalah suatu politik deklaratif dan politik aksiomatik. Pancasila berangkat dengan lima sila sebagai aksiomanya. Kemudian, langkah selanjutnya ialah memperjuangkan aksioma tersebut dengan militan. Pancasila dibuat bukan untuk membicarakan hakikat manusia Indonesia atau kondisi sosio-psikologis macam apa yang memungkinkan Indonesia merdeka terjadi. Indonesia merdeka dahulu, baru kita ajukan tesis baru setelahnya. Maka dengan kerangka pemikiran Badiouian, kita bisa memahami kembali bagaimana Pancasila dapat menjadi alat juang rakyat dan bukan hanya alat manipulasi negara.

Daftar Pustaka

Latif, Yudi, 2013, Membumikan Etika Pancasila dalam Penyelenggaraan Negara, Prosiding Kongres Pancasila V 2013

MPR RI, 2017, Prof. Kaelan: Pancasila Memberikan Nilai Dasar Yang Fundamental Dan Universal, http://www.mpr.go.id/posts/prof-kaelan-pancasila-memberikan-nilai-dasar-yang-fundamental-dan-universal

Soeprapto, Sri, 2013, Konsep Muhammad Hatta Tentang Implementasi Pancasila Dalam Perspektif Etika Pancasila, Jurnal Filsafat 23, no. 2: 99-116.

Soeprapto, Sri, 2014, Konsep Inventif Etika Pancasila Berdasarka Filsafat Pancasila Notonagoro, Yogyakarta: UNY Press

Suryajaya, Martin, 2014, Alain Badiou dan Masa Depan Marxisme, Yogyakarta: Resist Book

© Rusmul/BAL

Kisah di Balik Perjuangan Sang Wartawan

Dua puluh dua tahun sudah kepergian wartawan Udin dari dunia ini. Di balik kegigihannya dalam menguak kebenaran, tersimpan sisi lain dari kehidupannya yang belum disingkap.

Siang itu (22-04), tim Badan Penerbitan Pers Mahasiswa (BPPM) BALAIRUNG menemui seorang wanita di rumahnya di desa Gedongan, Kecamatan Trirenggo, Bantul. Wanita tersebut adalah Marsiyem, istri dari almarhum Fuad Muhammad Syafruddin atau akrab disapa Udin. Marsiyem dengan senyum lebarnya menyambut sambil menyapu ruang tamunya dengan tergesa-gesa. Ia meminta maaf karena kondisi rumahnya yang sedikit berantakan karena ia baru saja pulang mengantar anaknya ke sekolah. Setelah mempersilakan tim BPPM Balairung duduk, ia mulai menceritakan hal-hal yang selama ini belum banyak dibicarakan tentang Udin.

Dalam bayangan khalayak umum, sosok Udin bertubuh tinggi tegap, badannya berisi, berkumis dan berjenggot, serta tampangnya yang tegas dan sangar. Akan tetapi, di balik sosok Udin yang kerap kali disebut menakutkan itu, Marsiyem mengatakan bahwa Udin termasuk orang yang humoris dan mempunyai banyak teman. "Kalau dilihat sekilas emang serem tapi kalau sudah diajak ngomong orangnya asik kok," tutur Marsiyem.

Marsiyem mengatakan bahwa Udin pernah melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. "Ia hanya berkuliah selama tiga semester," ungkapnya. Marsiyem tidak terlalu mengetahui apa yang menyebabkan Udin memutuskan untuk berhenti kuliah saat itu. Menurutnya, Udin pernah bercita-cita ingin menjadi tentara. Akan tetapi cita-citanya tersebut gagal ia gapai. Udin juga pernah mendaftar jadi Pegawai Negeri Sipil, namun sayangnya ia kembali gagal.

Akhirnya Udin menjadi wartawan *BERNAS* pada 1985. Sebelum diterima bekerja sebagai wartawan, Udin memang menggemari kegiatan tulis-menulis, begitu kata Marsiyem. Ia menambahkan bahwa Udin selalu ingin membantu rakyat kecil, dan menjadi jurnalis adalah

salah satu caranya. Menyampaikan keluhan orang dan mengungkapkan apa uneg-uneg rakyat di media, agar kemudian kasusnya bisa dituntaskan. "Ia tertarik untuk jadi wartawan karena ingin membantu orang lain dan menurutnya membantu orang tidak harus menjadi pegawai negeri, apa pun bisa dilakukan, salah satunya dengan menulis," ungkapnya.

Setelah dua tahun menjadi wartawan, Udin menikah dengan Marsiyem di tahun 1987. Meskipun begitu, Udin sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan lebih memprioritaskan pekerjaan sebagai wartawan dibandingkan dengan keluarganya. Hal tersebut telah dimaklumi oleh Marsiyem. Ia mengungkapkan, pernah beberapa kali Udin membatalkan janji menemuinya dikarenakan ada panggilan tugas mendadak. Selain itu, Udin mengajak keluarganya pergi ke tempat berlibur baru pun dengan niat pribadi apabila nanti menemukan kejadian untuk diberitakan.

Mereka dikaruniai dua anak, perempuan dan laki-laki. Ketika kasus penusukan terjadi, anak perempuan pertama mereka berusia sembilan tahun. Sedangkan anak kedua mereka, laki-laki, berusia dua tahun. Marsiyem bercerita bahwa saat itu kedua anak mereka belum mengetahui sepenuhnya apa yang terjadi. Beberapa malam setelah itu, mereka masih sering menanyakan kenapa ayah belum pulang-pulang juga. "Setiap hari mereka dikasih tahu sedikit-sedikit, tapi pas sudah besar kan sudah bisa baca-baca beritanya sendiri," kata Marsiyem.

Sebagai sosok kepala keluarga, Udin termasuk seorang ayah yang mampu menempatkan diri pada situasi. "Kalau harus tegas, ya, dia tegas. Kalau harus humoris, ya, dia bercanda dengan anak-anak," kenang Marsiyem. Selain itu Udin meluangkan waktunya saat hari libur nasional untuk keluarga, yaitu dengan mengajak mereka jalan-jalan. Misalnya, pergi ke suatu tempat rekreasi atau makan di rumah makan *seafood*, makanan favoritnya, di Yogyakarta.

Udin memang menyukai makanan *seafood*, terutama kepiting dan kerang. Selain pergi ke tempat makan yang menyediakan menu laut, tempat lain yang digemarinya adalah pemancingan. Memancing bukanlah satu-satunya hobi Udin, karena ia juga suka main voli di kampung halamannya. Ditambah lagi, Udin juga suka menyusuri jalan setapak, mencoba medan-medan menakutkan untuk relaksasi pikiran. "Sekarang jalannya sudah diaspal, tapi dulu belum, dan dia suka motor-motoran di sana. Cari kegiatan yang menyegarkan," tutur Marsiyem.

Udin memang menekuni pekerjaannya sebagai wartawan ini tanpa setengah-setengah. Mendekati akhir dari kejadian pembunuhannya, teman-teman Udin yang juga bekerja sebagai wartawan di *BERNAS* telah memberinya peringatan. Beberapa kali mereka melapor telah melihat surat di Polres berisi perintah penangkapan Udin dan pernyataan bahwa Udin harus segera diproses. Menanggapi hal itu, menurut Marsiyem, Udin tetap tenang. Bahkan justru Udin yang menenangkannya setiap kali Marsiyem menyampaikan kekhawatirannya.

Sebelum Udin mengirim berita yang ia tulis ke editor *BERNAS*, tak jarang Udin memberi Marsiyem izin untuk membaca kontennya terlebih dulu. "Biasanya saya hanya bantu memperhalus aja, saya bilang kalau kalimat ini jangan ditulis terlalu begini, misalnya," kata Marsiyem. Meskipun begitu, Marsiyem juga sudah memahami bahwa Udin sudah menetapkan tujuannya dengan jelas, yakni menyelesaikan keresahan rakyat. Apabila Udin sudah berniat untuk membereskan suatu kasus, maka akan dikejarnya sampai tuntas.

Marsiyem membeberkan alasan mengapa Udin butuh meluangkan waktu untuk sesekali menjalani aktivitas *refreshing*. Hal itu karena Udin mengidap penyakit asma dan gula. Menjelang akhir dari masa hidupnya, Udin memang sudah diberi tekanan, karena ada laporan sekelompok pemuda melakukan aksi protes ke *BERNAS*. Pernah sekali Udin jatuh sakit karena asma yang dideritanya sehingga tidak bisa menerima tawaran seseorang yang mengajak bertemu. "Apalagi waktu mau operasi gara-gara ditusuk itu, gulanya tinggi banget. Untungnya karena koma, jadi bisa stabil," lanjut Marsiyem.

"Ia tertarik untuk jadi wartawan karena ingin membantu orang lain dan menurutnya membantu orang tidak harus menjadi pegawai negeri, apa pun bisa dilakukan, salah satunya dengan menulis,"

Sampai sekarang, ada momentum tertentu setiap tahunnya yang membuat Marsiyem rindu pada sosok almarhum suami. Momen tersebut adalah saat datangnya Ramadan hingga hari Lebaran. Selama bulan puasa tersebut, Udin selalu menyempatkan diri untuk sahur dan buka puasa di rumah bersama keluarga. Begitu pun ketika lebaran datang, Udin selalu mengajak anak-anak untuk pergi jalan-jalan. "Karena sudah biasa kalau sehari-harinya dia mendahulukan pekerjaan, jadi momen kayak gini bikin kangen. Keluarga selalu kumpul," kenangnya.

Saat kenangan itu kembali terbesit di pikirannya, Marsiyem mendadak teringat atas kasus Udin yang hingga saat ini belum jelas kelanjutannya. Akan tetapi, meskipun begitu, ia menganggap bahwa kasus itu telah "selesai". Hal itu karena kasus ini apabila dianalogikan seolah-olah hanya berjalan di tempat. "Nggak ada pemecahannya. Nggak bakalan diusut itu," tutup Marsiyem kepada tim BALAIRUNG.

Sependapat dengan yang dikatakan Marsiyem, Anang Zakaria selaku ketua Aliansi Jurnalisme Indonesia (AJI) Yogyakarta mengatakan bahwa kasus Udin memang masih belum terungkap. Menurutnya sudah banyak yang dilakukan oleh AJI maupun tim Kijang Putih yang membantu kepolisian mengumpulkan bukti-bukti dan bahkan investigasi tapi tetap saja mentok.

Anang sebagai seorang wartawan memandang keberanian Udin saat itu adalah hal yang memang harus dilakukan oleh seorang wartawan. Menurutnya wartawan merupakan manusia biasa yang mempunyai hak luar biasa dengan memegang amanat dari publik. Bagi Anang menjadi seorang wartawan memang harus berani. "Jadi wartawan ya harus berani kalau tidak berani tidak usah jadi wartawan," tuturnya.

Anang menutup dengan mengatakan bahwa sosok wartawan Udin dalam satu kata ialah "profesional".

[Noor Rasya, Putri Soleha]

MENDATAR

1. Waspada, tajam penglihatan
5. Satuan pengamanan
11. Ya (basque)
14. Bersambut-sambutan (dalam berpantun)
15. University of Georgia's Special Vehicle Engineering (sink.)
16. Salah satu *freie Reichsstadt* dalam Heiliges Römisches Reich; salah satu *Stadtkreis* di sungai Danube
17. Pandangan yang menyatakan bahwa manusia ditakdirkan sama derajat
20. Ikan yang umum diambil minyaknya yang kaya vitamin A, D, dan E
21. Tiga R; akronim yang merujuk pada hierarki pada *waste management*
22. Proses, pengenalan, dan penafsiran atas realitas melalui refleksi atau data indra
23. Kekurangan kadar hemoglobin dalam darah
25. Cristopher ..., salah satu sutradara, penulis skenario, dan produser film kenamaan Inggris
26. Kata sapaan hormat untuk laki-laki tanpa memandang usia
27. Obat dalam bentuk butiran kecil padat
28. Seorang kulit hitam (belanda)
32. Suka mengusik
34. Setan yg suka menyembunyikan anak-anak

36/63. Lemari tak berpintu

37. Telinga (inggris)
38. Salah satu kodon atau deret nukleotida
39. Bangsal
40. Bersifat naik turun, goncang
43. Tampik, ingkar
44. Benang saraf yang berasal dari tubuh sel neuron
45. Tanda bahaya kode Morse internasional
46. Partikel bermuatan listrik
47. Salah satu unsur kimia halogen non-logam
48. Baru (jawa)
52. Salah satu serangga *Lepidoptera*
55. Album pertama KLa Project yang dirilis tahun 1989
56. Ujian standar masuk perguruan tinggi di Amerika Serikat (singk.)
57. Majas yang berupa pembandingan manusia dengan non-manusia
60. Lembaga Survei Indonesa
61. Wasir, ambeien (afrikaans)
62. Satuan
64. Kelompok dalam badan legislatif yang terdiri atas beberapa anggota yang sepaham dan sependirian
65. Ibu kota Kerajaan Mughal pada 1526–1658; lokasi Taj Mahal berdiri

1	2	3	4	■	5	6	7	8	9	10	■	11	12	13
14				■	15						■	16		
17				18							19			
20			■	21			■	22						
23			24			■	25					■	■	■
■	■	26			■	27			■	28		29	30	31
32	33			■	34				35					
36			■	37			■	38			■	39		
40			41				42			■	43			
44					■	45			■	46			■	■
■	■	■	47		48			■	49				50	51
52	53	54					■	55			■	56		
57							58				59			
60			■	61						■	62			
63			■	64						■	65			

MENURUN

1. Beragam, berjenis-jenis
2. Truk, lori (inggris)
3. Anggota akademi
4. Garam (latin)
5. Benang halus dan lembut
6. Supaya
7. Hidrokarbon cair; salah satu zat yang umum disertakan dalam rokok (inggris)
8. Bersifat kejiwaan
9. Faedah (i=o, inggris)
10. Membuka lebar
11. Alat picu api peletup gas pada motor
12. Sedekah, derma (inggris)
13. Deret nomor unik yang berfungsi sebagai kode identitas perangkat seperti telepon genggam dan telepon satelit
18. Penggal kecil-kecil
19. Membuat baru (inggris)
24. (Kelompok) gedung yang berisi macam-macam toko
25. Salah satu sungai yang mengaliri lebih dari satu negara
27. Cacing kecil parasit
29. Arena
30. Electrical Warrant of Fitness
31. Tanda terima tertulis
32. Nama modern kota Edessa/ar-Ruha, kota kuno di Mesopotamia Hulu
33. Jonas ..., virolog dan penemu vaksin polio
34. Kata ganti orang kedua
35. Rumus kimia natrium florida
37. Ahli ilmu kepenulisan mengenai masyarakat, kelompok etnis dan formasi etnis
41. Dialek bahasa Yunani pascaklasik; bahasa Yunani perjanjian baru
42. Satuan ukuran berat seribu kilogram
43. Masih, seperti sebelumnya (belanda)
46. Pacar kuku
48. Alas, fondasi
49. *Thermotoga* ..., salah satu bakteri fermentasi glukosa yang anaerob
50. Menarik garis-garis kecil sejajar
51. Cari, lihat (islandia, nynorsk)
52. Catatan redaksi (prancis, singk.)
53. Lekas-lekas, melakukan dengan cepat
54. Wiracarita
55. Memilih (belanda); siapa punya (esperanto)
58. Neuer Berliner Kunstverein
59. Kantor Urusan Agama

Foto/tulis jawaban anda dan kirimkan ke *balairungpress@gmail.com* sebelum tanggal **1 September 2018**

TNI di Lapangan Sepak Bola

Pertahanan pemain belakang PS TIRA, Mahdi Albaar.

Tendangan lambung Teguh Amiruddin di penghujung laga.

Mariano Berriex dan Gustavo Fabián López.

Pelatih PS TIRA, Rudy Eka Priyambada bersama Gustavo López saat konferensi pers.

Detik-detik gol pertama pertandingan malam itu melalui sundulan Wawan Febrianto.

Tendangan bebas pemain Bali United di depan gawang.

Pertandingan sengit tersaji di Stadion Sultan Agung, Bantul, malam itu (30-4). Tuan rumah, PS TIRA mampu menaklukan tamunya, Bali United dengan skor akhir 2-1. Gol pertama dihasilkan oleh sundulan Wawan Febrianto dari tendangan sepak pojok Gustavo López. Tidak berselang lama, Stefano Lilipaly menyeimbangkan kedudukan menjadi 1-1. Pada babak kedua berbagai serangan tim tamu mampu dimentahkan pemain bertahan PS TIRA. Menuju menit akhir, Gustavo López menjadi penentu kemenangan pertandingan tersebut melalui golnya pada menit ke-80. PS TIRA menyambut kemenangan keduanya pada Liga 1 musim ini sedangkan Bali United harus menelan kekalahan perdananya.

PS TIRA dahulu bernama PS TNI yang terbentuk ketika mengikuti Piala Jenderal Sudirman, yang digagas salah satunya oleh Gatot Nurmantyo. Pada turnamen tersebut, tim TNI tergabung dengan PSMS Medan yang dimiliki Edy Rahmayadi, yang pada saat itu masih menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). Pemain yang membela tim tersebut berasal dari masyarakat sipil dan beberapa pemain sedang menempuh pendidikan TNI seperti Wawan Febrianto yang mencetak gol pertama malam itu.

Sejak Maret 2016, PS TNI dan PSMS Medan berpisah dan membentuk manajemen klub yang berbeda. PSMS Medan bermain di Divisi Utama, sedangkan PS TNI bermain di Liga 1 dengan mengakuisisi Persiram Raja Ampat. Meski berbeda kepengurusan, Edy Rahmayadi masih mengambil andil sebagai Ketua Umum PS TNI dan pembina PSMS Medan, selain juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI.

Tercatat sejak Januari 2017, Gatot Nurmantyo, yang saat itu masih menjabat sebagai Panglima TNI, memiliki saham terbesar PT Cilangkap TNI Jaya, legal dari PS TNI. Ia hadir dalam peluncuran pergantian nama PS TNI menjadi PS TIRA dan perpindahan kandang ke Stadion Sultan Agung, Bantul. "Karena TNI milik rakyat, kita putuskan nama PS TNI berubah menjadi PS TIRA yaitu TNI Rakyat," ujar Gatot. **[Ananta]**

Ahmad Syarifudin
(Sastra Indonesia 2011, Redaksi)

Ahmad Yani Fathur Rohman
(Filsafat 2013, Redaksi)

Nabila Alfariza
(Sastra Prancis 2013, PdA)

Bagus Zidny
(Sejarah 2013, Litbang)

Salsabila Syani
(Kimia 2013, PdA)

Adrianus Venda Pratama
(Antropologi Budaya 2013, Litbang)

Wulan Hardiyati Pangestika
(DPP 2013, Litbang)

Aliftya Amarilisyariningtyas
(DPP 2013, PdA)

Lamia Putri Damayanti
(Komunikasi 2013, Redaksi)

Avivah Vega Meidienna
(Kedokteran Hewan 2014, PdA)

Sanya Dinda
(Sastra Indonesia 2014, Redaksi)

Hannan Asrowi
(Sastra Nusantara 2014, Perusahaan)

Ni Luh Putu Juli Wirawati
(Komunikasi 2014, Redaksi)

Bangkit Kresna Adhi
(PSdK 2014, PdA)

Anggita Triastiwi
(HI 2014, Redaksi)

Zaki Fahmi
(Kimia 2014, Redaksi)

"Selamat bagi seluruh awak yang telah menyelesaikan masa pendidikannya di Universitas Gadjah Mada."

Pemanfaatan Data Facebook dalam Kampanye Politik Melanggar Privasi Pengguna

Big data *dimanfaatkan oleh beberapa tokoh politik untuk menyusun strategi kampanye mereka. Dalam kasus Cambridge Analytica,* big data *yang didapatkan dari Facebook telah melanggar privasi para penggunanya.*

Pada bulan Maret 2018, mantan Kepala Peneliti Cambridge Analytica (CA), Christopher Wylie, mengungkap kasus kebocoran data Facebook. Data ini diduga telah dimanfaatkan oleh CA untuk memenangkan pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) tahun 2016 silam (aljazeera.com, 2018). CA dikenal sebagai lembaga konsultan politik yang mampu memprediksi tingkah laku masyarakat sesuai dengan analisis data dari media sosial dan hasil *polling*-nya sendiri (investigasi.tempo.com, 2018).

Kasus ini berawal dari dibuatnya aplikasi kuis kepribadian "This is Your Digital Life" oleh peneliti dari Universitas Cambridge, Aleksander Kogan, yang cukup populer di Facebook (aljazeera.com, 2018). Kogan mengumpulkan data pengguna yang didapatnya dari Facebook dan memberikannya pada CA di luar sepengetahuan mereka (theguardian.com, 2018).

Atas kasus kebocoran data yang dialami, CEO Facebook, Mark Zuckerberg menyatakan dalam akun Facebook miliknya bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran kepercayaan antara Kogan, CA, dan Facebook. Selain itu, kasus ini juga merupakan bentuk pelanggaran kepercayaan antara Facebook dan penggunanya (facebook.com, 2018). Padahal di dalam perjanjian antara Facebook dan penggunanya ketika baru mendaftar, terdapat jaminan bahwa data pengguna dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan (facebook.com, 2018).

Facebook dan *Big Data*

Facebook didirikan oleh Zuckerberg pada 4 Februari 2004. Hingga sekarang, Facebook memiliki lebih dari 2,17 miliar pengguna aktif di seluruh dunia. Sedangkan di AS sendiri terdapat 230 juta pemilik akun Facebook (tekno.kompas.com, 2018). Pada awal berdirinya, Facebook mampu menggeser eksistensi media sosial yang telah ada lebih dahulu. Hal ini karena Facebook dirasa lebih memberikan kenyamanan berinteraksi personal maupun kelompok tanpa batas. Pengguna Facebook semakin bertambah seiring dikembangkannya fitur-fitur yang lebih menarik bagi penggunanya.

Fitur-fitur yang dikembangkan Facebook telah membentuk gaya hidup penggunanya. Sebagaimana dipaparkan oleh McLuhan dalam teori ekologi media "*medium is the message*", media mampu mempengaruhi persepsi dan tindakan seseorang terhadap lingkungannya. Dalam hal ini, Facebook membuat interaksi manusia lebih banyak dilakukan di dunia maya daripada di dunia nyata (openculture.

com, 2017). Dalam sehari, rata-rata pemilik akun Facebook di AS mengakses media sosial ini selama 50 menit (statista.com, 2018).

Tingginya intensitas penggunaan Facebook menciptakan kumpulan data berukuran besar (volume) yang disebut *big data*. Facebook memperoleh *big data* dari 136.000 foto yang diunggah, 510.000 komentar dalam kiriman, dan 293.000 pembaruan status per 60 detiknya. Keberadaan big data ini kemudian dimanfaatkan Facebook dengan algoritma untuk mengetahui kecenderungan dan ketertarikan pengguna, termasuk dalam aktivitas politik mereka (nytimes.com a, 2018).

Big Data Facebook untuk Strategi Kampanye Pemilu AS

Dalam kasus kebocoran data Facebook, big data yang dimanfaatkan untuk memenangkan kampanye Trump berawal dari kuis kepribadian daring yang dibuat oleh Kogan. Kuis ini tersebar pada 300 ribu orang AS. Untuk melakukan survei ini, pengguna diharuskan masuk (*login*) ke akun Facebook mereka. Dengan demikian, Kogan mempunyai peluang untuk tidak hanya mendapatkan hasil survei kepribadian saja, tetapi juga data profil dan rekaman aktivitas mereka di Facebook.

Kogan menggabungkan hasil kuis tersebut dengan data pengguna Facebook untuk mengembangkan model

psikometrik, semacam profil kepribadian (nytimes.com a, 2018). Kemudian Kogan menggabungkan data yang dimilikinya dengan catatan pemilih dan mengirimkannya pada CA. Upaya yang dilakukan Kogan dan CA tidak hanya berhenti di situ. Mereka juga mengambil data pribadi dari akun yang ada di daftar pertemanan mereka, serta menyusun profil serupa.

Melalui big data, pihak kampanye dapat mengetahui riwayat politik warga beserta kecenderungannya dalam mendukung suatu partai. Dengan kata lain, big data dapat secara akurat memprediksi warga negara yang akan mendukung kandidat. Keunggulan big data dalam ketepatan informasi perilaku dan kecenderungan pemilih dalam memberikan suara memudahkan pihak kampanye untuk mengangkat isu atau pesan politik yang dibawakan ketika berkampanye. Dengan memanfaatkan keunggulan big data, pihak kampanye dapat dengan lebih mudah menyingkirkan pihak lawan (vox.com, 2018).

Kendati demikian, big data belum mampu dimanfaatkan untuk memprediksi perilaku warga yang beroposisi atau tidak mendukung kandidat yang dicalonkan (Nickerson dan Rogers, 2013). *Big data* Facebook yang digunakan oleh CA untuk memenangkan Trump juga berbenturan dengan masalah privasi. Hal ini dikarenakan, data dimanfaatkan tanpa sepengetahuan pengguna, serta dilipatgandakan dan dibagikan secara luas ke seluruh dunia (Tene dan Polonetsky, 2012). Pelanggaran terhadap privasi menandai pula bahwa pengguna tidak memiliki kebebasan dalam mengendalikan informasi yang mereka miliki (nytimes.com b, 2018).

Privasi dan Keamanan Data

Atas kegagalannya dalam melindungi data 87 juta penggunanya, Zuckerberg dimintai kesaksian oleh kongres AS. Mantan Direktur Federation Trade Comission, Jessica Rich, menyebut bahwa kasus kebocoran data Facebook dapat diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan media sosial ini dalam menepati perjanjian persetujuan tahun 2011 untuk melindungi informasi pribadi pengguna. Dalam perjanjian tersebut, Facebook menjamin bahwa pengguna dapat menyimpan informasi mereka secara pribadi. Selain itu, pihak ketiga diluar Facebook dan pengguna hanya memiliki akses ke data yang diperlukan saja. Akan tetapi, dalam kenyataannya pihak ketiga justru memiliki akses ke hampir seluruh informasi pribadi pengguna (bloomberg.com, 2018).

Sebagaimana diungkapkan Kamala Harris, Senator California dari Partai Demokrat, Facebook juga dituntut atas transparansi dan kepercayaan terhadap data pengguna yang disalahgunakan. Zuckerberg menanggapi pernyataan Harris dengan mengakui kesalahan Facebook yang tidak memberitahu pengguna bahwa datanya telah digunakan (nytimes.com c, 2018)

Dalam kongres tersebut, Zuckerberg bertekad untuk menyelidiki segala aktivitas dari berbagai pihak atau aplikasi yang dianggap mencurigakan. Facebook akan melakukan audit penuh untuk memahami bagaimana pihak tersebut memanfaatkan data secara tidak pantas. Setelah melalui proses tersebut, Facebook akan mencekal pihak itu dan memberi tahu semua pengguna yang telah disalahgunakan datanya (nytimes.com c, 2018). Belajar dari pelanggaran perjanjian dengan Facebook pada 2011, Richard Blumenthal, Senator Connecticut dari Partai Demokrat, mengungkapkan bahwa diperlukan hukum yang mengikat agar perusahaan semacam Facebook tidak lagi memaksimalkan keuntungan dari privasi penggunanya (nytimes.com c, 2018).

Penutup

Pada Mei 2018, The European Union's General Data Protection Regulation mulai diberlakukan pada Facebook agar memberikan transparansi kepada penggunanya Melalui aturan tersebut, pengguna diharapkan memiliki persetujuan dengan Facebook mengenai pengumpulan data (nytimes.com, 2018). Dengan demikian, pengguna dapat mengetahui informasi yang dimiliki atau bahkan meminta datanya dihapus dari penyimpanan Facebook (variety.com, 2018). Facebook merespons aturan tersebut dengan memperbarui layanan dan kebijakan data. Hal ini dilakukan agar pengguna dapat melihat data yang dikumpulkan, sehingga mereka dapat membatasi dan menghapus data yang dimiliki Facebook. **[Tita, Setyaning]**

Daftar Pustaka

"Average Daily Time Spent On Selected Social Networks by Users in the United States from 2014 to 2019". Statista. https://www.statista.com/statistics/324290/us-users-daily-facebook-minutes/ (diakses pada 7 Mei 2018)

"Ketentuan Layanan". Facebook. https://www.facebook.com/legal/terms/update (diakses pada 5 April 2018)

Dance, Gabriel J.X, dkk. "How Cambridge Analytica Exploited the Facebook Data of Millions". The New York Times a. https://www.nytimes.com/video/technology/100000005806669/cambridge-analytica-facebook-profiles.html (diakses pada 3 Mei 2018)

Grant, Alastair. "Cambridge Analytica and Facebook: The Scandal So Far". Aljazeera. https://www.aljazeera.com/news/2018/03/cambridge-analytica-facebook-scandal-180327172353667.html, (diakses 9 Mei 2018)

Hern, Alex dan Cadwalladr, Carole. "Revealed: Aleksandr Kogan Collected Facebook Users' Direct Messages". The Guardian. https://www.theguardian.com/uk-news/2018/apr/13/revealed-aleksandr-kogan-collected-facebook-users-direct-messages (diakses pada 1 Mei 2018)

Illing, Sean. "A Political Scientist Explains How Big Data is Transfrming Politics". Vox. https://www.vox.com/conversations/2017/3/16/14935336/big-data-politics-donald-trump-2016-elections-polarization (diakses pada 21 April 2018)

Kang, Cecilia dan Roose, Kevin. "Zuckerberg Faces Hostile Congress as Calls for Regulation Mount". The New York Times b. https://www.nytimes.com/2018/04/11/business/zuckerberg-facebook-congress.html (diakses pada 1 Mei 2018)

Mark Zuckerberg. Facebook. https://www.facebook.com/zuck/posts/10104712037900071 (diakses pada 1 Mei 2018)

Marshall, Colin. "Marshall McLuhan Explains Why We're Blind to How Technology Changes Us, Raising the Question: What Have the Internet & Social Media Done to Us?" Open Culture. http://www.openculture.com/2017/08/marshall-mcluhan-explains-why-were-blind-to-how-technology-changes-us.html (diakses pada 7 Mei 2018)

Nickerson, David W. dan Rogers, Todd. "Political Campaigns and Big Data". Harvard Kennedy School (hks) Faculty Research Working Paper Series, RWP 13 045, 2013.

Nocera, Joe. "Why WhatsApp is no Threat to Facebook's Dominance". Bloomberg. https://www.bloomberg.com/view/articles/2018-05-04/whatsapp-and-instagram-are-no-threat-to-facebook-s-dominance (diakses pada 7 Mei 2018)

Ritonga, Efri. "Skandal Data Facebook: Kronologi, Pemain Kunci, dan Kasus di 10 Negara". Tempo. https://investigasi.tempo.co/249/skandal-data-facebook-kronologi-pemain-kunci-dan-kasus-di-10-negara
(diakses pada 2 Mei 2018)

Septania, Rizky Chandra. "Indonesia, Pengguna Facebook Terbanyak ke-4 di Dunia". Kompas. https://tekno.kompas.com/read/2018/03/02/08181617/indonesia-pengguna-facebook-terbanyak-ke-4-di-dunia (diakses pada 8 Mei 2018)

Spangler, Todd. "Facebook Under Fire: How Privacy Crisis Could Change Big Data Forever". Variety. http://variety.com/2018/digital/features/facebook-privacy-crisis-big-data-mark-zuckerberg-1202741394/ (diakses pada 27 April 2018)

Tene, Omer dan Polonetsky, Jules. "Symposium Issue: Privacy in the Age of Big Data: A Time for Big Decisions". Stanford Law Review Online, Vol. 63, No. 64, 2012.

The New York Times c. "Mark Zuckerberg Testimont: Senators Question Facebook's Commitmet to Privacy". The New York Times. https://www.nytimes.com/2018/04/10/us/politics/mark-zuckerberg-testimony.html (diakses pada 7 Mei 2018)

Konstruksi Identitas Bangsa melalui Permainan Budaya Layar

Perkembangan budaya layar pasca Orde Baru turut berkontribusi dalam konstruksi identitas bangsa Indonesia.

Judul Buku
Identitas dan Kenikmatan: Politik Budaya Layar Indonesia
Penulis
Ariel Haryanto
Penerjemah
Eric Sasono
Penerbit
Kepustakaan Populer Gramedia
Tebal Buku
xi+350
Waktu Terbit
2018 (Cetakan ketiga)

Indonesia diberkahi oleh keberagaman kebudayaan serta memiliki gagasan hasil percampuran pelbagai pandangan dunia yang menjelajahi wujud lokalnya. Sayangnya, oleh Orde Baru (Orba) keberagaman tersebut dikonstruksi menjadi suatu gagasan sempit tentang makna menjadi Indonesia. Misalnya, umat Islam dilarang menunjukkan keislamannya, penghapusan sejarah dan pelarangan gerakan politik kiri, sentimen rasialis terhadap etnis Tionghoa, dan unsur-unsur fasis rezim militer yang sarat maskulinitas siap perang. Namun, setelah reformasi identitas sempit tersebut dirumuskan ulang oleh kaum muda perkotaan yang melonjak jumlahnya serta memiliki suara lantang di ruang publik.

Merespons fenomena tersebut, Ariel tertarik untuk menjelaskan pelbagai dinamikanya melalui penelitian lapangan (2010-2012) serta menjelajahi literatur sejarah khususnya tentang politik budaya layar. Ariel menunjukkan hasil penelitian yang menarik, yakni bahwa politik budaya layar di masa Orba berpengaruh terhadap bangunan identitas masyarakat Indonesia kontemporer.

Penelitian Ariel meliputi islamisasi sebagai salah satu identitas yang berada di bawah naungan Orba. Islam diatur sedemikian rupa mengikuti kebijakan pada masa itu, misalnya pelarangan penggunaan hijab. Namun, untuk topik bahasan budaya layar, Ariel tidak menyebut satu pun judul film bertema islami yang tayang di masa Orba. Alih-alih, industri perfilman saat itu hanya menyuguhkan film-film dokumenter dan kesejarahan. Kebanyakan dari film-film itu merupakan alat propaganda yang ditujukan pada kelompok tertentu. Misalnya, kelompok komunis mendapat stereotip negatif dari publik melalui film berjudul “Pengkhianatan G 30 September” (1984). Film tersebut memang difokuskan untuk mengambinghitamkan komunis dalam pembunuhan tujuh perwira tahun 1965. Alhasil, sebuah identitas baru pun menyebar, yaitu Indonesia anti-komunis.

Seiring dengan kemunculan identitas tersebut, muncul pula stigma antitionghoa karena mereka dituduh sebagai etnis komunis. Tuduhan tersebut didasarkan atas anggapan adanya hubungan kekerabatan keturunan Tionghoa di Indonesia dengan leluhur di daratan Tiongkok yang hidup di bawah Partai Komunis Cina (PKC). Hal ini berkaitan dengan tuduhan PKC mendukung PKI dalam peristiwa G30S. Dalam industri perfilman Indonesia, peran etnis Tionghoa pun dinistakan dan dilupakan. Kemunculan keluarga Tionghoa di film “Putri Giok” (1980) juga hanya untuk dijelek-jelekkan serta dianggap sebagai masalah. Padahal film tersebut satu-satunya film di era Orba yang mengangkat kisah keturunan Tionghoa di Indonesia.

Memasuki awal Reformasi, masyarakat mengalami pergeseran opini mengenai identitas yang dikonstruksi semasa Orba Pernyataan anti-komunis ditelusuri ulang melalui perubahan alur film sejarah “Pengkhianatan G 30 September” (1984). Versi baru dari film tersebut menampilkan tokoh komunis sebagai korban atas pelanggaran HAM oleh rezim Orba. Akan tetapi, perubahan itu relatif singkat lantaran kekhawatiran pemerintah akan kebangkitan komunisme. Buku-buku teks sejarah yang menyatakan kelompok komunis sebagai korban pun lantas ditarik dari peredaran dan

© Ananta/BAL
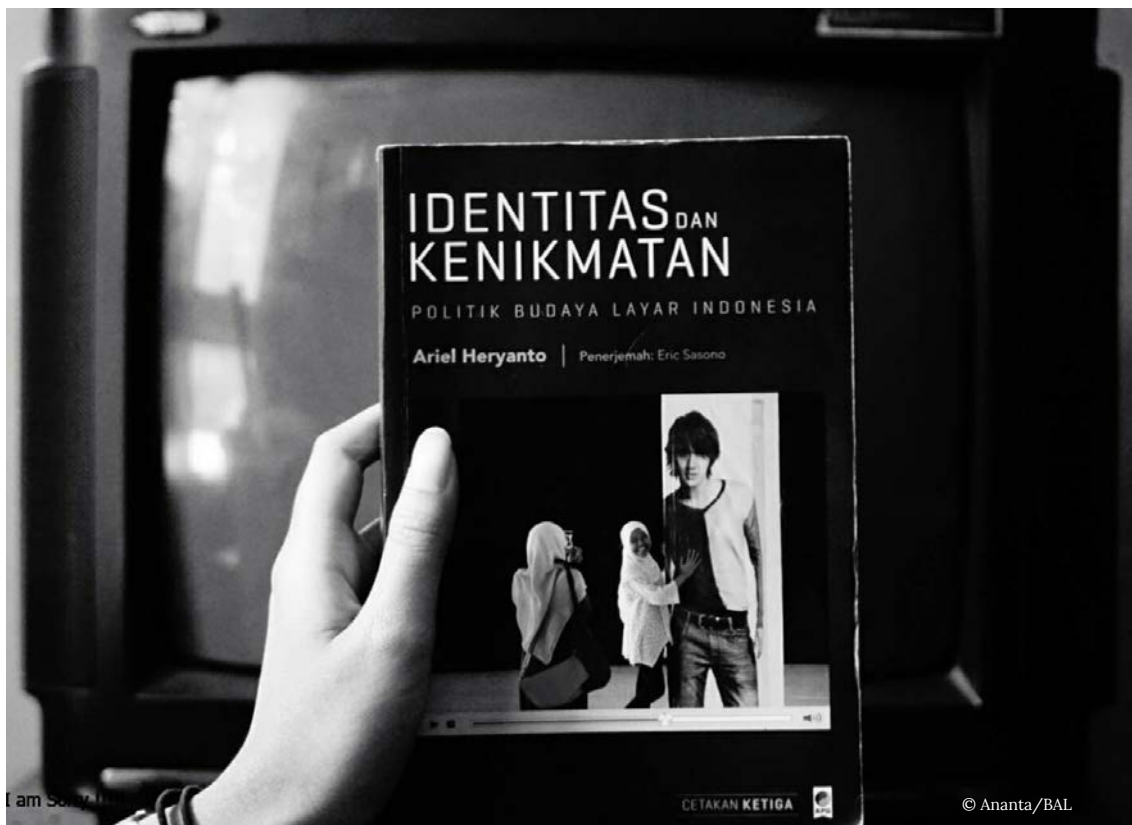
dimusnahkan oleh pemerintah.

Ariel berhasil mengupas tuntas sejarah yang sebenarnya terjadi melalui sebuah film berjudul "Tjidurian 19" (2009). Film tersebut mengimbangi sejarah dari sudut pandang korban atau saksi pada kekerasan tahun 1965. Selain itu, hadir pula film "The Act of Killing" (2012) yang secara frontal menampilkan wawancara kesaksian pelaku pembunuhan terhadap komunis pada tahun 1965. Kendati demikian, hingga kini sebagian masyarakat Indonesia tetap mempertahankan stereotip mereka terhadap komunis yang jahat. Hal tersebut merupakan buah dari doktrin dan propaganda film "Pengkhianatan G 30 September" yang ditayangkan pada masa Orba.

Terlepas dari pelanggaran HAM pada tragedi 1965-66, Ariel mengajak pembaca untuk menyelami perkembangan budaya layar islami di Indonesia pascareformasi. Islamisasi mulai menyeruak pada periode awal Reformasi, ditandai dengan munculnya film "Ada Apa Dengan Cinta?" (2002) dengan para pelakon beragama Islam. Namun, penggambaran tokoh dalam film tersebut masih belum menunjukkan identitas sebagai seorang muslim yang taat. Baru pada tahun 2008, muncul film "Ayat-ayat Cinta" yang berhasil menyuguhkan nuansa islami yang kental dengan sentuhan modern. Pada tahap ini, film bertema islami mendapat sorotan positif dari publik sekaligus mengangkat citra orang muslim sebagai pribadi yang intelek, terhormat, taat beribadah, tanpa menghilangkan sisi modernitasnya. Alhasil, film ini dijadikan patokan dalam bergaya hidup oleh masyarakat kalangan menengah. Mereka senantiasa bangga atas identitasnya sebagai orang muslim, juga turut menikmati kehidupan modern.

Tidak hanya menikmati identitas baru sebagai muslim yang modern, kelompok muslim muda ini juga semakin membuka diri dengan budaya yang lebih kosmopolitan. Hal ini ditunjukan Ariel melalui pemaparannya tentang kelompok perempuan muslim muda yang menggandrungi budaya layar dari *K-Pop* dan negara Asia Timur lainnya. Masuknya pelbagai budaya tersebut ternyata memiliki implikasi yang lebih besar. Fenomena ini juga berpengaruh pada berkurangnya sentimen rasialis terhadap Tionghoa yang dibangun selama Orba. Melalui film "Ca-bau-kan" (2002) dan "Gie" (2005), pelbagai prasangka diskriminatif era Orba terhadap keturunan Tionghoa mulai diangkat untuk diperbincangkan publik. Prasangka terhadap orang berwajah oriental yang selalu mendapat atribut buruk pun mulai berbalik haluan. Seperti yang diamati Ariel, berkat "Meteor Garden" perempuan yang dulunya menjaga jarak terhadap laki-laki berwajah oriental kini mulai melirik mereka.

Ariel berhasil mengeksplorasi perubahan identitas yang dialami masyarakat Indonesia pasca-Orba. Melalui bukunya, ia mengajak kita untuk memahami fenomena budaya pop kontemporer yang sering diperbincangkan melalui penelusuran sejarah politik budaya layar Indonesia. Ariel membuka mata kita mengenai isu identitas hari ini dan kaitannya dengan sejarah di masa lalu. Namun, bagi pembaca yang tidak familier dan belum pernah menonton film-film yang disebut dalam buku mungkin akan sedikit kesulitan memahami analisis yang dijelaskan. Struktur penulisan yang disajikan pun cukup rumit, tidak jelas batasan antara alur maju dan mundur. Selain itu, banyak istilah yang kurang dipahami awam. Walau demikian, analisis dalam buku ini sangat mumpuni dan dapat dijadikan acuan pustaka bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian serupa. **[Luqman, Fadhilla]**

Mewujudkan Pendidikan yang Merata melalui Aktivisme
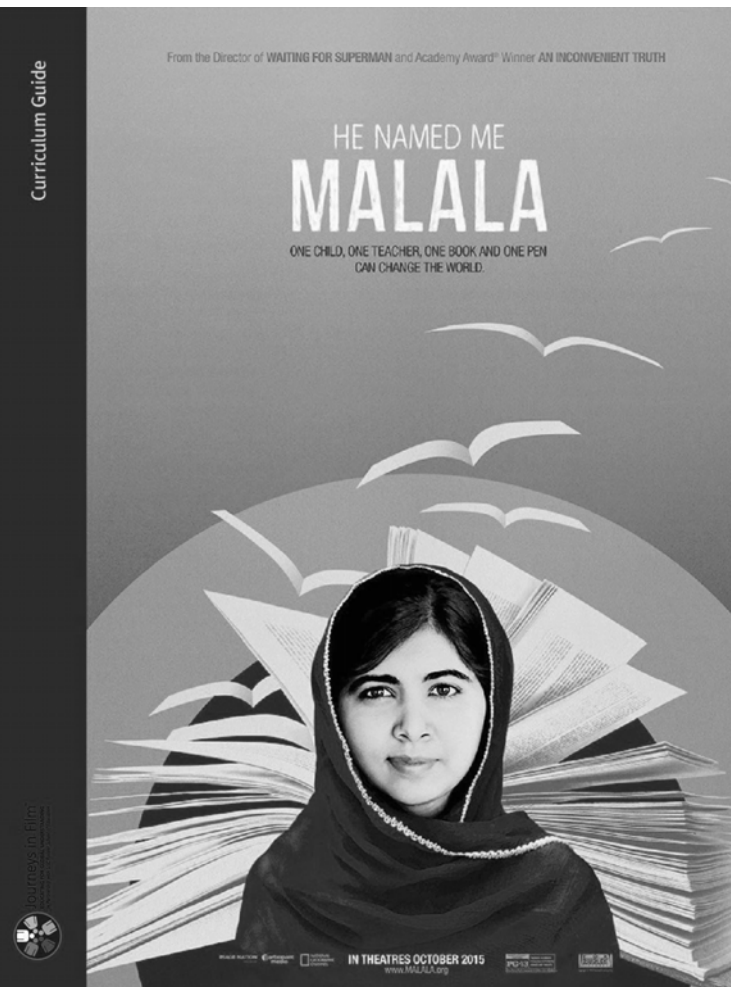
© Istimewa

Judul
He Named Me Malala
Tahun
2015
Genre
Dokumenter
Durasi
88 menit
Sutradara
Davis Guggenheim
Produser
Walter Parkes
Laurie MacDonald
Pemain
Malala Yousafzai
Ziauddin Yousafzai
Toor Pekai Yousafzai
Khusal Yousafzai
Atal Yousafzai

Setelah menyutradarai film dokumenter "An Inconvenient Truth" (2016) tentang perubahan iklim yang membawanya mendapat penghargaan Academy Award, kali ini Davis Guggenheim kembali dengan film yang mengisahkan kehidupan aktivis pendidikan dan pemenang Nobel Perdamaian tahun 2014. Ia adalah Malala Yousafzai, putri dari Ziauddin Yousafzai, seorang guru dan aktivis sosial, yang menceritakan bagaimana mencekamnya kondisi Distrik Swat di bawah kekuasaan Taliban.

Distrik Swat merupakan sebuah daerah di Pakistan yang sejak tahun 2007 hingga 2009 dikuasai secara penuh oleh kelompok radikal Islam, Taliban. Dipimpin Mullah Fazlullah, Taliban berambisi menerapkan hukum syariah Islam yang ketat. Taliban membuat beberapa peraturan seperti melarang tarian, pesta, musik, dan memperingatkan tukang cukur untuk tidak mencukur janggut para pria. Di film ini, dikisahkan bahwa penduduk yang tidak menaati peraturan tersebut akan dieksekusi di depan umum. Berdasarkan informasi dari artikel "Pakistan Rebuilds Its Education Network After Taliban Are Driven Out of Swat" yang ditulis Khan dalam laman berita *The Guardian* (2012), sejak 2007 hingga 2012, Taliban telah

menghancurkan sekitar 400 dari total 1.576 sekolah di Swat. Sekitar 70% bangunan sekolah yang dihancurkan tersebut merupakan sekolah perempuan.

Malala yang geram mendengar hal tersebut kemudian mendapatkan dorongan dari sang ayah untuk berani menyuarakan pendapatnya. Kegiatan aktivisme Malala bermula ketika ia mendapatkan tawaran untuk menulis di sebuah blog yang diinisiasi oleh BBC Urdu. Di blog tersebut, ia mencurahkan kegelisahan akan kondisi yang terjadi di daerahnya, seperti yang tertulis dalam catatan hariannya tanggal 14 Januari 2009. Ia menceritakan kekhawatirannya tentang pihak sekolah yang tidak memberitahukan tanggal masuk kembali setelah libur musim dingin. Malala juga gencar melakukan kampanye yang menuntut terbukanya akses pendidikan bagi perempuan melalui pidato serta wawancara yang disiarkan oleh saluran TV nasional. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk perlawanan, setelah Taliban mengeluarkan dekret yang melarang anak perempuan untuk pergi bersekolah sejak 15 Januari 2009.

“Kegiatan aktivisme memberi harapan untuk terselenggaranya pendidikan yang merata. Meski begitu, perlu kerja sama dari banyak pihak agar tujuan aktivisme ini dapat tercapai.”

Perjuangan Malala menemui tantangan ketika identitas pribadinya mulai diketahui oleh Taliban. Malala menjadi korban penembakan seorang pria yang diklaim sebagai anggota Taliban pada tanggal 9 Oktober 2012. Penembakan ini disinyalir merupakan upaya Taliban untuk membungkam warga Distrik Swat. Pasca penembakan, Malala dan keluarganya pindah ke Inggris. Di sana ia melanjutkan sekolahnya dan semakin giat berkampanye memperjuangkan hak-hak pendidikan perempuan. Ditunjukkan dalam film ini bahwa Malala beberapa kali mengunjungi negara-negara yang sedang berkonflik seperti Irak dan Nigeria. Di negara-negara tersebut, Malala mengunjungi tempat pengungsian untuk menyemangati anak-anak di sana. Anak-anak yang hidup di wilayah konflik kerap harus berpindah-pindah tempat tinggal demi alasan keselamatan.

Berdasarkan film ini, dapat diketahui bahwa terdapat persamaan kondisi pendidikan antara Pakistan dan Indonesia, yakni keduanya belum mampu menciptakan lingkungan yang mendukung bagi terselenggaranya kegiatan pendidikan. Di Indonesia, masalah utama di bidang pendidikan adalah kurang meratanya distribusi sarana dan prasarana, misalnya gedung dan jalan. Kondisi geografis Indonesia yang berupa kepulauan menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memastikan pembangunan infrastruktur pendidikan dapat tersebar secara merata hingga ke seluruh pelosok negeri.

Selain infrastruktur, masalah lain yang menjadi sorotan adalah ketimpangan jumlah guru. Berdasarkan data dari siaran pers Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang dirilis pada 25 Januari 2017, persebaran komposisi guru Pegawai Negeri Sipil di tingkat provinsi paling banyak berada di DKI Jakarta dengan jumlah 33.037. Sedangkan persebaran komposisi guru terendah adalah Kalimantan Utara dengan jumlah 1.116 guru. Selanjutnya pada tingkat kabupaten, sebaran guru terbanyak berada di Kabupaten Bandung dengan jumlah 11.657 guru dan terendah berada di wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak dengan jumlah 42 guru. Selain itu, menurut mantan Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru RI, Sulistyo, diperkirakan ribuan guru Instruksi Presiden (Inpres) yang direkrut pada tahun 1974 sampai 1975 di masa Orde Baru akan pensiun tahun 2018-2023.

Sebagai upaya untuk mengurangi masalah kesenjangan jumlah guru, baik pemerintah maupun swasta mengambil langkah konkret dengan cara mengirim relawan untuk mengajar ke daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T). Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki program Guru Garis Depan (GGD) yang merupakan perwujudan poin ketiga Nawa Cita presiden Jokowi. Para guru yang mengikuti program GDD akan mengabdi selama 10 tahun di 93 kabupaten tujuan penempatan. Selain itu, ada juga kegiatan pengajaran yang diinisiasi oleh organisasi nonprofit, seperti program Indonesia Mengajar. Hingga tahun 2016, Indonesia Mengajar telah mengirim 671 pengajar muda yang tersebar ke 24 kabupaten/kota dan memiliki 143 lokasi kerja sukarelawan.

Selain pemerintah dan organisasi nonprofit, aktivisme pendidikan juga didukung oleh komunitas yang dirintis secara individual. Adalah Butet Manurung, yang pada tahun 2003 menggagas berdirinya Sokola Rimba di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas Jambi. Berdasarkan informasi dari laman resmi Sokola Rimba, hingga saat ini Sokola Rimba sudah menjalankan programnya di sembilan provinsi di Indonesia. Dalam wawancara dengan Yulia Indi Sari di Inside Indonesia tahun 2016, Butet mengatakan tujuan dari komunitas ini adalah untuk meningkatkan literasi masyarakat suku pedalaman. Selain mengajarkan baca tulis, Sokola Rimba juga mengenalkan bagaimana kehidupan di luar suku Anak Dalam terutama dalam menghadapi tantangan modernitas. Butet Manurung ingin agar masyarakat suku pedalaman dapat menyelesaikan masalahnya sendiri dengan memahami keadaan yang terjadi. Upaya di atas merupakan contoh dari kegiatan aktivisme yang dalam Oxford Dictionary memiliki makna “Kebijakan atau tindakan menggunakan kekuatan kampanye untuk membawa perubahan politik atau sosial”.

“He Named Me Malala” mengingatkan tentang pasal 19 dan 26 nomor 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat” dan “Setiap orang berhak memperoleh pendidikan”. Hingga kini, masih terdapat banyak masalah yang menyelimuti dunia pendidikan, seperti terbatasnya akses pendidikan bagi perempuan, keadaan negara yang tidak kondusif, hingga belum meratanya infrastruktur pendidikan. Jika melihat kondisi di Indonesia, cukup banyak langkah konkret yang dilakukan sebagai upaya mengatasi kurangnya tenaga pengajar yang tersedia. Namun, langkah tersebut hendaknya tidak dijadikan sebagai solusi tunggal. Diharapkan pembangunan dan pemerataan infrastruktur pendidikan yang disertai dengan distribusi tenaga pengajar terus dilakukan, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta. **[Rayhan, Wida]**

© Maulidya/BAL

Melihat Heroisme Militer di Balik Film

"Film memiliki kemampuan yang jauh lebih cepat dibanding bacaan untuk membuat orang memahami pesan," tulis Adolf Hitler dalam *Mein Kampf*. Hal senada juga diungkapkan oleh Dr. Budi Irawanto, M.A., Dosen Ilmu Komunikasi UGM, bahwa orang tidak memerlukan literasi untuk sekadar memahami film. Menurut Budi, potensi film yang besar dalam memobilisasi massa mendorong rezim penguasa untuk menjadikan film sebagai alat propaganda. Seperti halnya pada era Orde Baru, pemerintah mengeluarkan sokongan finansial yang besar untuk mendorong produksi film-film militer. Terlihat pada kurun 1981-1998, film-film militer pun mulai bermunculan, seperti "Pengkhianatan G 30 S PKI", "Janur Kuning", "Serangan Fajar", dll.

Melalui film-film tersebut, rezim Orde Baru berusaha memperkuat hegemoninya dengan menanamkan ideologi militer kepada masyarakat. Budi menganggap hal tersebut adalah upaya Soeharto untuk melegitimasi kekuasaannya bersama militer. Dalam hal ini, rezim Orde Baru berusaha menancapkan ideologi bahwa perjuangan meraih kemerdekaan adalah hasil kerja keras militer melalui perjuangan bersenjata. Oleh karena itu, tema perjuangan dan heroisme militer sangat menonjol dalam film-film propaganda tersebut. Jika demikian, lalu bagaimana peran sipil direpresentasikan dalam film-film tersebut?

Pada Jumat (04-05), bertempat di Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM, BALAIRUNG berkesempatan berbincang dengan Budi Irawanto. Kami mewawancarai Budi sebagai seorang kritikus film untuk membahas pandangannya terkait peran film sebagai medium penanaman ideologi militer serta relevansinya saat ini.

Apa yang melatarbelakangi Anda untuk menulis buku *Film, Ideologi, dan Militer*?

Pada awal tahun 90-an, banyak bermunculan kelompok-kelompok studi di kalangan mahasiswa yang mengkritisi kepemimpinan Soeharto. Topik yang hangat diperbincangkan saat itu adalah militerisme. Berbagai organisasi saat itu melakukan kajian kritis terhadap dwifungsi ABRI hingga mendorong saya untuk mengangkatnya menjadi topik skripsi.

Saat itu, kajian yang membahas mengenai film militer masih sangat jarang. Bahkan untuk mendapatkan data, saya harus mencari literatur di Perpustakaan Institut Kesenian Jakarta. Akan tetapi, hingga saat ini kajian tersebut masih relevan jika dilihat melalui film militer masa kini.

Apa yang dimaksud dengan Ideologi Militer?

Ideologi militer sebenarnya merujuk pada heroisme. Heroisme militer sendiri biasanya direpresentasikan oleh tokoh utama yang merupakan seorang panglima tentara di mana posisinya sangat dipahlawankan. Melalui tokoh utama, militer berusaha menancapkan kontribusi dan peranannya dalam meraih kemerdekaan. Namun permasalahannya terletak pada representasi yang tidak adil karena perjuangan meraih kemerdekaan tidak hanya disumbang oleh tentara saja. Selain itu, ada klaim yang menyatakan bahwa tentara kita tidak seperti tentara di luar negeri. Tentara kita bersifat organik. Maksud dari organik adalah tentara lahir dari perjuangan rakyat. Anggapan inilah yang kemudian dianggap menjustifikasi mengapa tentara sejak awal ikut terlibat dalam kegiatan sipil. Dalam praktiknya, dapat kita lihat dengan adanya Bintara Pembina Desa yang ikut membantu kegiatan masyarakat desa. Selain itu, tentara biasanya juga ikut terlibat dalam kegiatan sipil yang bersifat komando ataupun hierarki.

“Ideologi militer yang dihegemoni kepada masyarakat akan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari masyarakat dan membuat pengaruh militer terhadap negara semakin dominan.”

Mengapa kemudian militer memilih film sebagai medium untuk menanamkan ideologi mereka?

Keunggulan film dibanding dengan medium lain sebenarnya terletak pada kekuatan audiovisualnya yang dapat mengaktifkan seluruh indra manusia. Oleh karena itu, untuk sekadar memahami film, setiap orang tidak memerlukan literasi. Hal ini yang kemudian membuat film sebagai medium yang ampuh untuk memobilisasi massa. Anggapan ini juga sesuai dengan pemikiran Michel Foucault yang menyatakan bahwa kekuasaan tidak hanya dibangun dari cara represif tetapi juga melalui cara produktif. Maksud dari produktif adalah membangun wacana melalui suatu medium agar menjadi sumber pengetahuan, salah satunya membangun wacana melalui film.

Bagaimana upaya yang dilakukan militer untuk menanamkan ideologinya melalui film?

Militer mencoba memasukkan *image* heroisme ke dalam film. Heroisme digambarkan melalui tokoh tentara yang gagah melawan musuh untuk menyelamatkan negaranya. Perlawanan selalu ditampilkan dalam bentuk fisik, seperti perkelahian atau aksi tembak-menembak. Penggambaran heroisme tersebut bertujuan untuk menunjukkan bahwa peran tentara sangat kuat dalam membentuk bangsa ini melalui perjuangan bersenjata. Selain itu, penggambaran heroisme militer juga bertujuan untuk mengerdilkan peran sipil dalam perjuangan meraih kemerdekaan.

Apakah terdapat asosiasi antara rumah produksi dengan militer dalam pembuatan film militer?

Memang ada, contohnya seperti rumah produksi film Janur Kuning yang dimiliki oleh mantan anggota ABRI. Bahkan pada film “Janur Kuning” yang bertanggung jawab terhadap materi-materi sejarah dari film tersebut ialah Kolonel Marsudi. Ia merupakan seorang mantan kolonel dan tahanan politik yang memiliki hubungan dekat dengan Soeharto. Hal tersebut berakibat pada konten-konten sejarah yang ditampilkan dalam film sangat diawasi oleh pemerintah.

Apakah dalam perkembangannya ada perubahan ideologi yang disampaikan militer kepada masyarakat?

Setelah hampir 19-20 tahun, sebenarnya tidak banyak yang bergeser. Apabila kita menilik film “Merah Putih”, tetap saja yang selalu digambarkan adalah heroisme militer. Dalam hal ini, perjuangan meraih kemerdekaan terkesan hanya hasil kerja keras tentara saja, tanpa ada peran sipil di dalamnya.

Apa saja dampak yang terlihat dalam masyarakat akibat adanya usaha penanaman ideologi militer melalui film?

Ideologi militer yang dihegemoni kepada masyarakat akan berpengaruh pada kehidupan sehari-hari masyarakat dan membuat pengaruh militer terhadap negara semakin dominan. Contohnya seperti penggunaan seragam, pawai dengan cara baris-berbaris, kegiatan hiburan yang dibuka dengan upacara-upacara tipikal militer, dll. Selain itu, ideologi militer juga turut menanamkan ideologi ketertiban melalui penyeragaman pada masyarakat dan tendensi integralistik dalam praktik politik. Semua itu ditanamkan kepada masyarakat sejak Taman Kanak-kanak dan diteruskan hingga dewasa. Dampaknya dapat membuat masyarakat tidak sadar terhadap pembagian tugas antara politik dan militer yang tidak jelas. Rezim militer yang stabil memberi peluang kekuasaan tentara mendominasi birokrasi. Terlihat setelah pemilu 1987, persentase perwira tentara aktif di lembaga perwakilan meningkat.

Apakah ada resistensi dari masyarakat terhadap upaya penanaman ideologi militer melalui film?

Elemen *spectacle* (tontonan) dalam film-film militer dibuat sangat menarik. Oleh karenanya membuat orang yang menonton adegan peperangan justru merasa senang. Bahkan, anak kecil yang menonton akan ikut memperagakan adegan perang. Jadi, tidak ada resistensi dari masyarakat. Selain itu, adanya kontrol dari pemerintah terhadap media yang dianggap kritis terhadap militer juga membuat masyarakat menerima begitu saja.

Di sisi lain, menurut saya film “Naga Bonar” karya Achru Sani itu merupakan antitesis dari seluruh film militer masa orde baru. Pada film tersebut, tentara digambarkan sangat berlawanan dengan yang selalu digambarkan oleh rezim Soeharto. Tentara digambarkan melalui tokoh preman bernama Naga Bonar yang sangat takut dan patuh pada ibunya. Hal tersebut sangat berkebalikan dengan gambaran tentara yang selalu menjadi pimpinan teratas dan tidak mengenal rasa takut. Selain itu, Naga Bonar sebagai seorang komandan juga digambarkan dapat menangis di depan anak buahnya. Padahal, *image* tentara selalu sebagai sosok yang sangat tegar. Oleh karena itu, melalui film tersebut terlihat upaya untuk merubah *mindset* tentang tentara kepada masyarakat. Hanya saja film ini dikemas dalam bentuk komedi sehingga resistensi yang ditunjukkan tidak begitu nampak. Sejauh ini baru itu yang saya lihat sebagai bentuk resistensi terhadap film militer. **[Jalu, Anisa]**

© Ananta/BAL

Menggugah Kesadaran Kemanusiaan melalui Kamisan

Yang hilang menjadi katalis
di setiap Kamis
nyali berlapis
(Efek Rumah Kaca - Jingga)

Tugu Jogja pada Kamis (19-4) sore seperti biasanya terlihat padat merayap oleh kendaraan bermotor. Terlihat beberapa kali pengendara melambatkan kendaraan dan menolehkan kepalanya, sadar akan kehadiran lima anak muda di sisi timur tugu yang menghadap ke arah Jalan Jenderal Sudirman. Para pemuda berpayung hitam dan memegang spanduk bertuliskan "Menolak Lupa" sedang melakukan aksi. Para pemuda itu melakukan aksi yang mereka sebut Kamisan, mengingatkan kembali peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu dan hari ini.

Di sela-sela waktu berdiri, salah seorang dari kelima pemuda tersebut berjalan mendekat ke pengendara yang menunggu lampu merah berubah hijau. Pemuda berbaju dan bertopi hitam tersebut mengeluarkan beberapa kertas dari *tote bag* putih miliknya. Kertas-kertas tersebut berisi ajakan untuk ikut berdiri bersama mereka, meningkatkan kesadaran bahwa kasus pelanggaran HAM tak kunjung usai. Pemuda itu dengan ramah mengedarkan kertas-kertas tersebut kepada pengendara yang menunggu giliran jalan. "Dengan kesadaran masyarakat tentang

pelanggaran HAM, harapannya pelanggaran HAM tidak akan terulang lagi," ujar pemuda yang bernama Muhammad Zaen itu.

Muhammad Zaen yang akrab dipanggil Bob menceritakan, komunitas Kamisan ini sebagian besar terdiri dari mahasiswa. Kegiatan perkuliahan menjadi prioritas utama seorang mahasiswa, oleh karenanya Kamisan tidak menuntut banyak kepada anggotanya. Tidak seperti komunitas pada umumnya, Kamisan tidak memiliki keanggotaan yang terikat. "Saya salut dengan kawan-kawan yang masih menyempatkan ikut aksi di tengah kesibukan kuliah," ungkap Bob. Tidak ada pula sistem rekrutmen dan persyaratan khusus dalam komunitas ini. Kamisan terbuka bagi siapa saja.

Selaku koordinator, Bob bercerita bahwa Kamisan di Jogja ini telah ada sejak Maret 2014 lalu. Kamisan yang dicanangkan oleh Social Movements Institute (SMI) ini merupakan perpanjangan tangan dari Kamisan Jakarta yang telah ada lebih dulu. Kamisan Jakarta mulai sejak 18 Januari 2007 di depan Istana Negara dan terus berlangsung sampai sekarang, bahkan merambat ke kota-kota lain di Indonesia. Keluarga korban pelanggaran HAM yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) adalah yang mengawali kegiatan ini. Awalnya JSKK menuntut penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang menghilangkan anak-anaknya saat peristiwa di tahun '98. Sampai sekarang, JSKK tetap bertahan dengan prinsip dan perjuangannya menuntut dan mengingatkan penyelesaian kasus HAM.

Sebagai perpanjangan tangan aksi Kamisan Jakarta, Kamisan Jogja menggunakan simbol-simbol yang serupa dalam melakukan aksinya. Kegiatan aksi Kamisan yang dilakukan di Jakarta antara lain mengenakan kaus hitam, memegang payung hitam, berjalan keliling istana negara, dan sesekali membunyikan kentungan atau memasangi atribut kasus-kasus pelanggaran HAM. Walaupun detail kegiatan yang dilakukan Kamisan di setiap kota berbeda, namun semuanya memiliki kesamaan yang tidak bisa diubah. Yakni, kegiatan yang dilakukan sebagian besar adalah diam mematung sambil memegang payung hitam sebagai simbol duka cita. Kawan Kamisan baik di Jogja maupun daerah lainnya bersepakat untuk menyamakan simbol-simbol Kamisan yang telah ada sebelumnya di Jakarta.

Ketua SMI, Melki A. S., yang mengenakan setelan baju hitam dipadukan dengan celana pendek, mengistirahatkan kakinya setelah berdiri sepanjang sore melakukan aksi. Setelah habis sebatang rokok, Melki kemudian menjelaskan makna di balik slogan yang tertulis di spanduk yang mereka bawa. "Menolak Lupa" sebagai slogan utama menjadi bermakna, karena secara simbolis menuntut penuntasan pelanggaran HAM yang dikhawatirkan menjadi impunitas dan terlupakan. Seperti kasus Salim Kancil yang dibunuh karena mempertahankan tanahnya sendiri. Tak lupa pula perkembangan kasus Munir yang masih abu dan belum terungkap. "Kita tidak boleh diam jika tahu ada kejahatan di bangsa ini, minimal bergabung dan menyuarakan di Kamisan," sambung Melki.

Untuk menarik perhatian masyarakat dan menyampaikan asipirasinya, kawan Kamisan melakukan inovasi-inovasi. Seperti tidak lama ini mereka pernah melakukan aksi Kamisan dengan menggunakan topeng berwajah Munir saat menuntut penyelesaian kasus Munir. Pada awal mulainya Kamisan di Jogja, kawan Kamisan juga melakukan kreasi-kreasi dalam aksinya. "Dulu kawan Kamisan pernah melakukan aksi teaterikal, pantomim, baca puisi, orasi, dan sebagainya," cerita Melki. Walau begitu, baginya tidak penting mengenai apa dan bagaimana mereka melakukan aksi tersebut. Menurutnya yang terpenting adalah bagaimana suara tuntutan mereka bisa sampai ke masyarakat.

Melki dan kawan-kawan menganggap bahwa Kamisan merupakan "ibadah kemanusiaan", meski sembari bercanda, Melki mengemukakan alasan sebutan itu. Sebagai penggiat gerakan sosial, Kamisan merupakan ibadah paling kecil dalam perjuangan kemanusiaan. "Selemah-lemahnya iman, jika tidak terjun langsung ke lokasi konflik, setidaknya berdirilah bersama kami, ikut Kamisan," seru Melki. Sebutan kamisan sebagai "ibadah kemanusiaan" menimbulkan rasa tanggung jawab bagi anggotanya untuk tetap melakukan aksi Kamisan. "Kalau tidak dianggap sebagai ibadah, nantinya seolah menjadi beban," tambahnya.

Kamisan sebagai gerakan sosial memberi dampak bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Terjadi perubahan setelah mengikuti Kamisan yang dirasakan oleh kawan Kamisan. Bob mengatakan ada dampak intelektual dan psikologis yang didapat dari Kamisan. Dampak intelektual yang didapatnya yaitu wawasannya menjadi lebih terbuka akan persoalan HAM dengan menganalisisnya. "Karena kita tidak bisa mengatakan 'ini pelanggaran HAM tanpa menganalisis," paparnya. Setelah memahami lebih dalam apa itu HAM, Bob merasakan dampak psikologisnya, ia jadi lebih sensitif dengan persoalan-persoalan HAM.

> "Bagi kawan Kamisan yang terpenting adalah menegaskan posisi kalau ketidakadilan tidak bisa didiamkan, tuntutan penyelesaian kasus HAM tidak boleh diabaikan."

Hal tersebut juga dirasakan oleh Muhammad Khairu Riza yang kerap dipanggil Riza, mahasiswa semester enam di UIN Sunan Kalijaga Jogja. Ia bergabung dengan Kamisan pada akhir 2016. Sejak bergabung, ia mendapat lebih banyak informasi mengenai kasus-kasus pelanggaran HAM. *Ngobrol* dengan kawan-kawan Kamisan, membuka wawasannya tentang kasus-kasus HAM yang belum pernah ia ketahui sebelumnya. "Saling cerita kasus-kasus HAM baik masa lampau atau kasus baru, jadi menambah informasi," ujarnya.

Ada pesan yang mereka bawa dari setiap aksi Kamisan, membangun dan mengunggah kesadaran masyarakat untuk empati dan simpati terhadap kasus kemanusiaan. Bagi kawan Kamisan yang terpenting adalah menegaskan posisi kalau ketidakadilan tidak bisa didiamkan, tuntutan penyelesaian kasus HAM tidak boleh diabaikan. Sebagaimana bunyi sila kelima Pancasila "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia", namun kenyataannya banyak penindasan dan ketidakadilan HAM diabaikan begitu saja. "Bagaimana bisa kita diam melihat keadilan yang dikhianati?" tanya Melki. **[Anggriani, Vania]**

Malang Melintang Penanganan Pelecehan Seksual di Kampus

Pelecehan seksual di kampus masih terjadi. Bagaikan fenomena gunung es, banyak penyintas belum melaporkan kejadian yang dialaminya. Beberapa faktor memengaruhi hal tersebut, salah satunya adalah lingkungan yang tidak berpihak pada penyintas.

© Rusmul/BAL

"Saya sedang di Solo, bisa temani saya? Saya sedang masuk angin." Kalimat tersebut muncul di layar ponsel Ani (bukan nama sebenarnya). Saat dibuka, Ani terkejut karena ternyata pesan tersebut berasal dari dosennya. Curiga dengan ajakan macam itu, Ani lalu menolaknya. Sebelumnya, Ani mengaku pernah menghubungi dosen tersebut beberapa kali untuk mengikuti bimbingan konseling yang ditawarkan. Namun sejak saat itu, Ani berhenti menghubunginya.

Kejadian yang dialami Ani merupakan salah satu contoh kasus pelecehan seksual berbentuk verbal. Di beberapa kasus, ajakan tersebut kerap kali diterima oleh mahasiswa yang kemudian mendapat pelecehan seksual berbentuk sentuhan atau kontak fisik. Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2018 melaporkan bahwa sebanyak 76% kekerasan terhadap perempuan adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang dimaksud meliputi pencabulan (911 kasus), pelecehan seksual (704), perkosaan (699), dan persetubuhan (343). Komnas Perempuan juga mencatat bahwa sepanjang tahun 2014-2016 pelecehan seksual yang terjadi di institusi pendidikan menempati posisi kedua terbanyak setelah pelecehan seksual di ranah privat.

Salah satu contoh pelecehan seksual yang pernah terjadi di UGM adalah kasus Siti (bukan nama sesungguhnya) dengan temannya. Siti mengatakan bahwa pelaku adalah temannya di salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Fakultas (UKMF) yang bergerak di bidang seni. Meski kejadian tersebut terjadi pada 2016 silam, mahasiswa FISIPOL berumur 22 tahun ini baru membagikan kisahnya pada akhir Maret 2018 di media sosial.

Walaupun dua tahun telah berlalu, kejadian itu masih membekas di pikiran Siti. Siti pun memutuskan menarik diri dari organisasi. Ia merasa baik pelaku maupun pengurus UKMF belum melakukan pendekatan kepadanya bahkan setelah ia berbagi di media sosial. Ketika dikonfirmasi kepada pengurus UKMF yang bersangkutan, pihaknya merasa telah melakukan pendekatan baik ke Siti maupun pelaku. Namun, pengurus UKMF tersebut mengaku tidak mau bergerak lebih lanjut karena menganggap kasus ini bersifat pribadi.

Selain itu, pelecehan seksual juga terjadi di tingkat Universitas. Pada pertengahan tahun 2017, Tita (bukan nama sebenarnya) juga pernah mengalaminya di Gelanggang Mahasiswa. Tita menceritakan kronologi kejadian yang pernah ia alami melalui salah satu akun berbagi informasi di media sosial, dua minggu setelah peristiwa. Sejak kejadian itu, Tita mengaku sempat mengalami trauma dan takut hingga enggan mengunjungi Gelanggang Mahasiswa selama beberapa waktu. "Aku merasa bersalah dan sempat pakai jilbab dan rok kalau mau bertemu mereka," kata Tita sambil menunjuk setengah lengannya sebagai penanda panjang jilbabnya.

Menanggapi hal tersebut, pengurus UKM yang bersangkutan mengaku telah mempertemukan Tita dengan pelaku. Pihak UKM menganggap penanganan kasus Tita sudah selesai setelah pertemuan tersebut. Padahal, sebaliknya, Tita sebagai korban merasa tidak diberikan perlindungan. Bahkan kini, setelah selang setahun sejak kejadian, ia diminta tutup mulut oleh salah satu temannya supaya tidak menceritakan pengalamannya lagi. "Aku tidak tahu siapa yang dipercaya pada kasus ini, aku atau pelaku, tapi yang jelas hal ini benar-benar aku alami," kata Tita.

Pada dasarnya, institusi pendidikan memiliki kewenangan untuk menangani kasus pelecehan seksual. UGM sendiri sebenarnya telah memiliki mekanisme penanganannya. Aturan itu terdapat di Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada No. 1699/UN1.P/SK/HUKOR/2016 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan di Lingkungan UGM. Keputusan itu menjelaskan jenis-jenis pelecehan seksual, sistem pencegahan, dan sistem penanganannya.

Berdasarkan aturan tersebut, penyelesaian pelecehan seksual di UGM dilakukan oleh Unit Layanan Konseling dan Tim Investigasi Khusus. Unit Layanan Konseling bertugas menangani pelecehan seksual dan memberi nasihat serta bimbingan yang diperlukan selama dan setelah penyelidikan. Sedangkan Tim Investigasi dibentuk ketika insiden pelecehan seksual terjadi pada lebih dari satu departemen atau situasi, di mana penyelidikan oleh departemen dianggap bermasalah. Kedua mekanisme ini sama-sama memerlukan kerja sama dari pihak departemen dan fakultas/sekolah dalam penyelesaian kasus.

Sayangnya, kasus-kasus pelecehan seksual di kampus yang telah dilaporkan sekalipun mengalami beberapa hambatan dalam proses penyelesaiannya. Salah satu contohnya adalah laporan resmi yang pernah diterima oleh Departemen Hubungan Internasional (HI) UGM pada tahun 2016 lalu. Ialah EH, inisial dosen yang melakukan pelecehan seksual kepada salah satu mahasiswanya. Seperti yang diberitakan di koran *The Jakarta Post* pada 3 Juni 2016 silam, salah satu penyintas bernama samaran Maria menceritakan bahwa kejadian tersebut terjadi di kantor salah satu pusat studi UGM. Posisi Maria yang saat itu adalah mahasiswa di kelas yang diampu EH menyebabkan ia sulit menghindari hal tersebut.

Masih dikutip dari *The Jakarta Post*, Maria merasa seharusnya EH tidak lagi berada di kampus, mengingat reaksi korban EH lain yang bisa bertemu dengannya. Menurut konfirmasi yang diberikan oleh wakil dari departemen, EH telah diberhentikan sementara dan tidak dapat diaktifkan kembali di HI. Namun, hingga tulisan ini diterbitkan, FISIPOL masih memproses penanganan lebih lanjut atas laporan yang dialami Maria.

Apabila berkaca dari kasus Siti dan Tita, para penyintas pelecehan seksual juga kerap mengalami trauma dan takut. Defirentia One selaku Staf Pengembangan Program di Rifka Annisa, lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada penghapusan kekerasan pada perempuan, mengatakan bahwa lingkungan penyintas yang tidak mendukung dapat mengakibatkan para penyintas kerap kali bungkam. Sebab, menurut pengamatan One, penyintas pelecehan seksual yang telah berani melapor sekalipun kerap menjadi korban lagi (*revictimization*).

Dalam studi mengenai kekerasan berbasis gender (*gender-based violence*), *revictimization* adalah kondisi di mana lingkungan masyarakat tidak percaya pada pengakuan penyintas. Ketidakpercayaan tersebut ditunjukkan lewat respon yang menuduh penyintas sebagai pihak yang terlebih dahulu menggoda pelaku, dan justru mengucilkannya. Kondisi yang demikian kerap kali mengakibatkan gangguan stres pascatrauma (*posttraumatic stress disorder*). Gejala yang dialami oleh penyintas yang mengalami hal ini biasanya berupa munculnya rasa cemas dan mulai menyalahkan dirinya sendiri. "Tidak ditanganinya kasus pelecehan seksual yang mampu memihak pada korban dapat mengakibatkan mereka stres, trauma, bahkan depresi," tambah One.

Sri Wiyanto Eddyono, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dosen Hukum Pidana UGM menambahkan bahwa meskipun berisiko, keberanian penyintas untuk melaporkan kejadian yang mereka alami tetap diperlukan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan seluruh warga kampus. Perempuan yang akrab disapa Iyi ini juga menegaskan bahwa penyintas dijamin dalam UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Tidak hanya itu, Meila Nurul Fajriah, S.H., selaku salah satu staf pembela umum LBH Yogyakarta juga menjamin bahwa Pemerintah Provinsi Yogyakarta telah mengakomodasi perlindungan penyintas melalui Rumah Aman. Peraturan tersebut tertulis pada Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2012. Untuk wilayah Sleman, Rifka Annisa mempunyai beberapa Rumah Aman yang berfungsi untuk memulihkan kondisi psikologis penyintas dan korban terdampak lainnya. Segala bentuk bimbingan konseling akibat trauma karena kekerasan seksual juga akan dilayani secara gratis. Dengan adanya mekanisme tersebut, harapannya, para penyintas pelecehan seksual mau melaporkan pengalamannya supaya tidak ada lagi korban yang lainnya. "Kami perlu laporan-laporan dari penyintas untuk mengadvokasikan isu ini dalam jangka panjang," pesan Meila. **[Ayu, Ima]**

Balon-balon Merah

Muhammad Yasir
Mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan

Sudah sepuluh tahun ini Kerwani berjudi nasib sebagai seorang penjual balon. Umurnya yang baru saja masuk 65 tahun di 30 September 2017 kemarin tak sekali pun membuatnya memilih untuk menikmati masa tua yang seperti ampas kopi dengan hanya berbaring di kasur atau mengharapkan kiriman amplop dari tiga anaknya di perantauan. Meski demikian, sebagai seorang ibu acapkali ia bertanya pada diri sendiri. Bagaimana keadaan anak-anaknya. Sedang apa mereka. Makan apa mereka hari ini. Namun, pertanyaan-pertanyaan itu tak pernah menemu jawaban. Rasa kantuk dan capek keburu menjeratnya ke dalam mimpi yang biasa-biasa saja. Lihat! Malam ini bulan warna abu-abu kemerah-merahan.

***

Mingg pagi yang biasa-biasa saja tiba bersama kereta Solo-Yogya. Embun di jendela mulai berganti debu jalan raya yang terbawa angin. Bangsa binatang pun tampak sibuk di halaman belakang rumah maupun laman. Dan, bangsa manusia sedang sibuk-sibuknya pergi ke gereja atau pasar atau malasan-malasan di kamar atau bank terdekat atau sekadar makan nasi uduk di torotoar jalan. Orang kebanyakan bilang hari ini akan lebih baik dan lebih sehat ketika diawali dengan senam pagi. Mereka lupa ada Kerwani di tanah tumpah darah yang kaya raya ini, di kota yang konon jadi rumah bordil bagi orang-orang VOC, KNIL, priyayi, dan raja-raja, di bangsa dan negara yang kemerdekaannya diberikan penguasa Bangsa Matahari kepada sang proklamator dan sang bapak koperasi ala negeri yang jauh. Kerwani dengan sepasang matanya yang tak bisa memandang bagaimana gedung-gedung pencakar langit menginjak-injak rumah-rumah kumuh di tepi kali di kota dan mengusir si miskin kecil dengan mangkuk di tangan kirinya, semringah membuka Minggu pagi.

Seperti pagi-pagi sebelum pagi ini, Kerwani mempersiapkan balon-balon yang nantinya akan dijual di taman di ujung gang. Balon-balon itu semuanya warna merah dan agar tampak menarik Kerwani menggambar bunga pada semua balon. Setelah semuanya siap, Kerwani akan berjalan perlahan ke halaman rumah yang tak luasnya tak seberapa itu dan ia hanya berdiri di sana. Apabila kepalanya terasa hangat, itu pertanda pukul tujuh. Dan iapun mesti lekas-lekas beranjak sebelum para pelanggannya pulang dari taman.

"Balon! Balon!" teriak Kerwani dengan payah sembari menelan rasa capek di tubuhnya. "Balon! Balon!" ia mengulangi.

Tak begitu lama waktu berlalu, segerombolan anak-anak datang merubung Kerwani, membeli balon. Segerombolan itu membeli semua balon-balon itu. Namun, dari gerombolan itu ada seorang anak laki-laki yang tak kebagian balon. Ia berdiri bergeming dengan raut muka memelas. Kerwani sejatinya tahu bahwa ada yang berdiri di hadapannya dan menatapnya – bagaimanapun perasaan seorang ibu tak bisa kau dustakan!

"Tak kebagian balon?" Tanya Kerwani pada anak itu.

"He'em," jawab anak itu.

Kerwani pun mengambil balon yang sengaja ia simpan di sakunya dan meniupkan untuk anak itu.

"Tak perlu besar-besar ya, Nek! Aku takut kalau balon itu meletup," ucapnya dengan nada yang mengingatkan Kerwani pada tiga anaknya di perantauan.

Kerwani semringah kemudian berkata, "Ini, ambilah dan jaga baik-baik ya!"

"Terima kasih, Nek!" jawab anak itu sembari berlari menuju gerombolan kawan sebayanya.

Sekali lagi, Kerwani semringah.

***
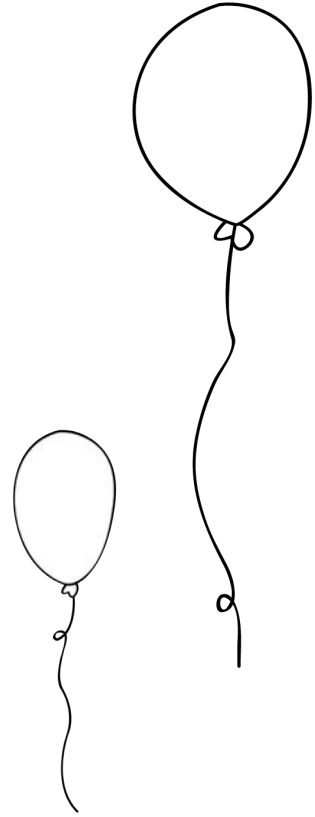
SUAMI Kerwani mati di awal tahun sepuluh tahun lalu. Kata Mantri – karena Kerwani hanya mampu membawa sang suami ke Puskesmas, mendiagnosa kanker otak di kepala sang suami telah akut, jadi cara satu-satunya ya dioperasi. Sebagai keluarga yang bernasib sial melulu, Kerwani tak punya cukup uang untuk operasi sang suami. Akhirnya ia memutuskan untuk merawat sang suami di rumah dengan obat warung yang tak jelas asal-muasalnya.

Tiga hari sebelum ajal menjemputnya, sang suami berpesan pada Kerwani yang acapkali termenung, murung.

Begini:

Kau tahu, Istriku, sampai saat ini aku masih mencintaimu. Kau membuatku kuat dalam peperangan ini. Meskipun aku kalah, tak setitik pun cintaku berkurang padamu. Kau tahu, Istriku, seandainya aku akan hidup beberapa tahun lagi kan kubelikan kau sebuah cermin dengan penuh ukiran kayu jati seperti yang kau ingin sebelum kita menikah dulu. Seandainya, Istriku, seandainya! Namun, kita berdua pun tahu bukan, bahwa kita hidup dalam, ah, kau pun tahu kukira.

Kerwani, Istriku, mengapa langit terasa dekat dengan wajahku. Kau tahu kenapa? Itu pertanda ajalku semakin dekat saja. Ajal, jika ia berupa manusia, maka akan kusuruh ia kembali beberapa tahun lagi dan akan kukatakan padanya, "Aku ingin membelikan Istriku
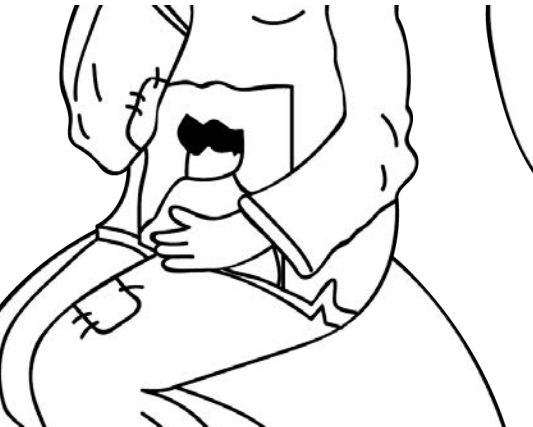
cermin dengan penuh ukiran kayu jati!" Istriku yang manis, bila aku mati hari ini, esok hari, atau lusa nanti tolong jangan kau makamkan aku di Pemakaman Umum! Jangan kau sandingkan aku dengan manusia-manusia, tapi makamkan aku di pelataran rumah ini tepat di samping makam anjing kita. Ingat itu baik-baik, Kerwani, Istriku. Lihatlah! Betapa manisnya kau kalau tersenyum!

Bila teringat ucapan sang suami, Kerwani tak kuasa menahan air matanya untuk tidak meleleh di dua garis di pipinya. Betapa ia mencintai sang suami yang menyelamatkannya dari sebuah rumah bordil, dahulu.

"Hanya kenanganlah harta berharga yang kumiliki!" ucap Kerwani dalam hati sebelum petang ditelan malam bulat-bulat.

***

SEKALI WAKTU keributan terjadi di tempat biasa Kerwani berjualan balon. Seorang perempuan muda marah besar. Mulutnya meledakan makian. Semua pasang mata sentak menyaksikan keributan itu. Seakan-akan mereka sedang menyaksikan sebuah pertunjukan terbaik tahun ini.

"Anda tidak punya mata?! Lihat! Lihat wajah anak saya merah begini karena balon yang anda jual!" ucap perempuan itu dengan nada tertingginya. "Sekarang anda musti ganti rugi!"

"O, Nak, kau tuduh aku yang salah?" ucap Kerwani lirih. "Jika kau memang ngotot menuduhku, baiklah, ambillah semua hasil jualanku ini. Jika masih kurang, catat nilainya dan katakan padaku berapa jumlahnya. Aku akan melunasinya."

"Enak di anda!" lanjut perempuan itu.

"Tak ada yang enak dalam kehidupan ini, Nak. Hayatilah dalam-dalam lagi. Dan jangan kau perpanjang perkara ini. Ambillah uang hasil jualanku ini. Kalau pun masih kurang, catat dan katakan berapa jumlahnya. Aku akan melunasinya."

"Baiklah!" ucap perempuan itu sembari mengambil uang Kerwani dan berlalu pergi tanpa nurani.

Setelah pertunjukan itu selesai orang kebanyakan pun pergi satu-satu dengan raut wajah ada yang puas dan ada yang tak kuasa menahan iba, menangis. Namun, orang kebanyakan tadi tetaplah orang kebanyakan yang sampai kapan pun lebih suka jadi penonton. Bukan begitu?

Setelah kejadian yang tak enak di hati Kerwani itu, tak satu pun balon-balon merah dengan gambar bunga itu laku. Anak-anak yang acapkali bermain di taman dilarang ibu-ibu mereka membeli balon-balon itu. Lantaran itu, iapun menghentikan perjudian nasibnya dan memilih menelan masa tuanya di rumah dan membakar semua balon-balon merah di sebelah makam sang suami.

Ini Indonesia, Kerwani! Ini Indonesia! Di mana orang seperti kau akan berumur panjang biar semakin panjang dan matang pula penderitaanmu.

***

HUJAN yang turun tak pernah lupa membawa hembusan angin dingin. Kali ini hembusan angin itu tak kosong. Ia berhembus membawa bau busuk dari arah kiri gang. Semua orang sibuk mencari sumber bau busuk itu dua hari sudah. Akhirnya, di hari keempat mereka menemukan sesosok mayat membusuk dari sebuah rumah.

"NEK KERWANI TELAH MATI!" teriak seorang pemuda yang menemukan Kerwani terbaring membusuk di atas kasur hadiah pernikahannya sembari memeluk foto sang suami.

Lihat! Lihat wajah beberapa orang yang pura-pura mentikkan air mata itu! Memuakkan!

Yogyakarta, 01 Oktober 2017
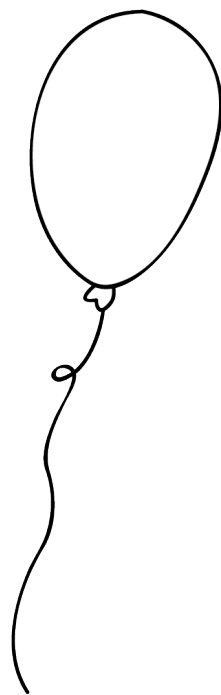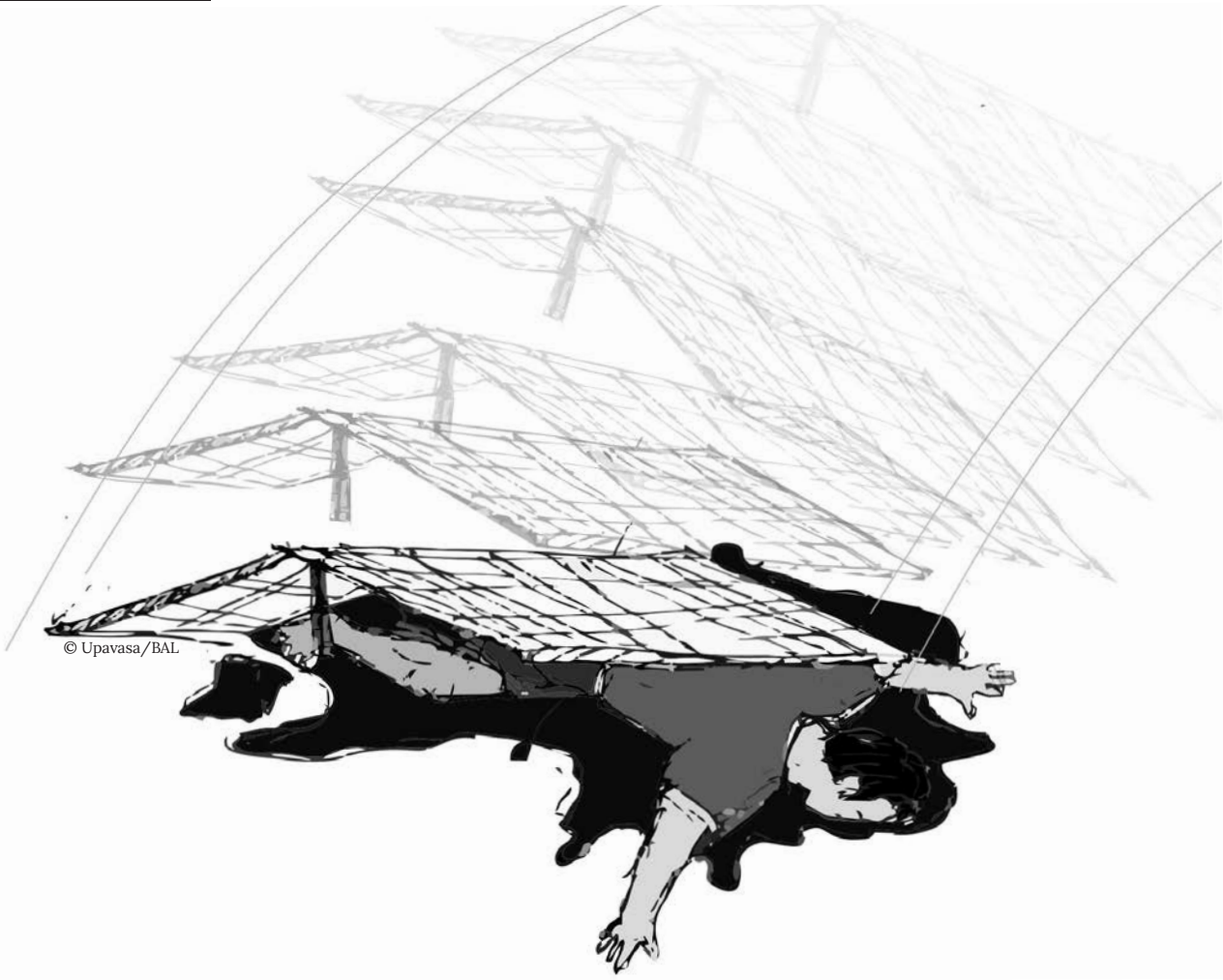
© Upavasa/BAL

Kegedhen Empyak Kurang Cagak

Didahului dengan gempa vulkanik selama beberapa detik, Merapi kembali erupsi pada awal bulan Mei. Goncangan yang cukup kuat terasa di daerah utara Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), umumnya bagi masyarakat yang tinggal di Kabupaten Sleman. Tak lama berselang, angin membawa abu vulkanik kearah selatan, menghujani seisi kota. Jalanan berubah pucat,abu vulkanik menutupi aspal jalan.

Menurut kepercayaan masyarakat, Merapi memiliki "penunggu". Konon, penunggu ini akan mencegah segala dampak buruk yang datang dari gunung agar jangan sampai merugikan masyarakat Yogyakarta. Mbah Maridjan menyebutkan jika Merapi meletus, ia sedang *duwe gawe*, hajat besar dan penting. Pernah pada abad ke 16, Raja Hadiwijaya, raja dari Kerajaan Pajang, mengirim pasukan untuk melemahkan Kerajaan Mataram. Pasukannya yang di sela perjalanan berkemah di sekitar Prambanan diporak-porandakan oleh letusan Merapi dan terpaksa mundur. Letusan Merapi menyelamatkan Mataram dari ancaman pasukan Pajang. Keberdaan Merapi sebagai bagian dari alam lantas disyukuri dalam rangkaian upacara *Labuhan* yang diperingati setiap delapan tahun sekali. Letusan Merapi justru

menjadi berkah bagi masyarakat kala itu, ia menjadi peristiwa penting dalam sejarah berdirinya Kerajaan Mataram.

Tak berhenti sampai di situ, letusan Merapi juga membawa dampak baik bagi kesuburan tanah. Letusan akan membawa perubahan mendasar pada sumber daya tanah yang terjangkau material letusan. Lahan di sekitar letusan yang terkena abu vulkanik umumnya memiliki daya dukung dan produktivitas yang lebih tinggi karena adanya pemupukan asal letusan secara alami. Tak ayal, tanah di daerah Yogyakarta yang notabenenya adalah daerah jangkauan material Merapi menjadi lahan subur untuk pertanian. Alam melalui Merapi, secara tidak langsung telah menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat Yogyakarta. Sejengkal tanah adalah kehidupan, *sedhumuk bathuk senyari bumi.*

Pertanian sendiri menjadi sektor penting di perekonomian DIY. Badan Pusat Statistik (BPS) DIY mencatat jumlah panen padi per tahun 2016 di DIY sebesar 882.702 ton. Data dari Bank Indonesia, per tahun 2016, pertumbuhan ekonomi DIY disokong oleh sektor industri sebesar 12%, sektor pertanian menyumbang 11%, sektor hotel dan restoran sebesar 10% dan sektor konstruksi 9%. Sektor pertanian tidak kalah gemerlapnya dengan sektor industri dan bahkan menunjukan persentase yang lebih besar dibanding sektor hotel, restoran dan konstruksi.

Di sisi lain, industri pariwisata berkembang pesat di DIY. Luas lahan pertanian (sawah) dari data BPS menunjukan DIY mengalami penurunan luas lahan dari tahun 2012 seluas 56.364 ha menjadi 55.292 ha. Berbarengan dengan berkurangnya lahan pertanian, hotel dan restoran menjamurdan kian hari kian bertambah banyak. Dihitung dari jumlah kamar, untuk akomodasi hotel berbintang saja, terhitung ada 5.150 kamar dan naik di tahun 2016 menjadi 9.256 kamar di DIY. Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman menjadi dua daerah penyumbang akomodasi hotel berbintang terbanyak di DIY.

Kebutuhan akan pembangunan industri pariwisata tentunya memerlukan pengorbanan. Hal itu dapat dilihat dari ketersediaan ruang bagi masyarakat yang kian hari makin kecil. Berdasarkan data dari Dinas Pertamanan dan Kebersihan DIY, luas ruang terbuka hijau di Yogyakarta adalah 5,11 ha (1,6% dari luas kota) yang terdiri dari 62 taman, hutan kota dan jalur hijau. Padahal UU No. 26 Tahun 2007 menjelaskan bahwa ruang terbuka hijau paling sedikit 30% dari luas kota. Meskipun ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta dinilai sangat kurang, bangunan-bangunan beton -malah terus didirikan dan tak sedikit yang berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat.

Masyarakat Yogyakarta juga dihadapkan dengan masalah ekologis. Dampaknya tidak sepele, kasus warga kesulitan air terjadi di lingkungan masyarakat yang harus berbagi sumber airnya dengan hotel dan apartemen. Dilansir dari *Tempo*, Dr. Ir. Teguh Eko Paripurno, MT, Geolog Universitas Pembangunan Negeri Veteran Yogyakarta, mengatakan bahwa pembangunan hotel yang tak terkendali di Kota Yogyakarta membuat permukaan air tanah terus menurun sebanyak 15-50 sentimeter per tahunnya. Banyaknya hotel yang memerlukan air dengan volume yang besar memberi isyarat bahwa permukaan air tanah bisa saja menurun lebih parah dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Pemerintah yang memiliki hak pengaturan tanah dengan dasar Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG) mungkin agak kebingungan mengatur banyaknya potensi ekonomi yang dimiliki DIY. Demi percepatan ekonomi, lahan pertanian disingkirkan dengan mengalihfungsikan lahannya ke sektor pariwisata dan perdagangan. Apakah sektor pariwisata yang perkembangannya cukup potensial telah menciptakan keyakinan bahwa keberadaan lahan pertanian produktif sudah tidak menjanjikan lagi di tengah arus perekonomian di saat ini?

> "Kita memang masih perlu banyak belajar untuk menjadi lebih bijaksana lagi dalam melaksanakan pembangunan yang tidak berdampak buruk bagi manusia dan kelestarian alam"

Jika begitu, Yogyakarta sebagai daerah pusat kebudayaan dan daerah dengan lahan pertanian produktif mungkin perlu dipertanyakan lagi. Sebab, kesejahteraan dan kebahagiaan adalah datang dari dalam diri manusia yang bertautan dengan lingkungannya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ciptoprawiro dalam bukunya *Filsafat Jawa* (1986), bahwa filsafat Jawa menekankan pentingnya kesempurnaan hidup (*Ngudi Kasampurnan*), bahwa manusia itu selalu berada dalam hubungan dengan lingkungannya, yaitu Tuhan dan alam semesta serta meyakini kesatuannya (*Manunggaling Kawula Gusti*). Keberadaan manusia tidaklah berdiri sendiri. Jasmani dan rohani manusia berhubungan langsung dengan manusia lainnya dan alam. Gerak perkembangan zaman saat ini telah memisahkan eksistensi manusia dan hubungannya dengan alam. Pembangunan menjadi dalil pengecualian atas falsafah hidup yang tertanam sejak lama.

Sebuah pepatah Jawa mengatakan, *udan gemblong omahe wong, udan gaplek omahe dhewe, meksa luwih ing omahe dhewe*, sebaik-baiknya rumah orang lebih baik rumah sendiri. Segala perbuatan yang tidak memperhitungkan dampak-dampaknya pada sesama dan kelangsungan sumber daya alam hanya akan merusak rumah sendiri. Jika lahan pertanian kian tipis, air makin sulit didapat dan masyarakat jauh dari kata sejahtera, masihkah lebih nyaman di rumah sendiri?

Permasalahan lingkungan sudah sangat terasa, penggusuran dan penyempitan ruang hidup masyarakat juga kian ramai, namun kita masih saja latah dengan pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Kita memang masih perlu banyak belajar untuk menjadi lebih bijaksana lagi dalam melaksanakan pembangunan yang tidak berdampak buruk bagi manusia dan kelestarian alam. Jika alam telah rusak, upacara *Labuhan* dipersembahkan untuk siapa? Kita memang banyak maunya tapi sedikit kemampuan untuk mewujudkannya. *Kedeghen empyak kurang cagak.*
[Penginterupsi]
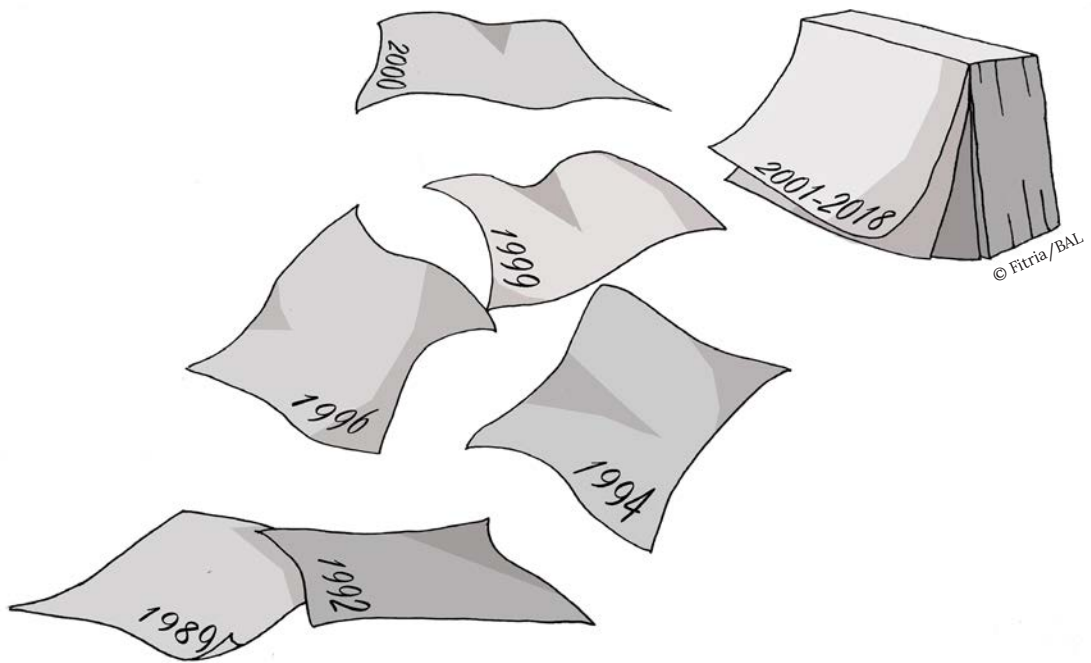
Apa itu yang Dinamakan BALAIRUNG?[1]

Dalam analisis Hs. Bachtiar mengenai dinamika sejarah pers mahasiswa Indonesia, BALAIRUNG lahir dalam konteks sejarah yang ia namai sebagai masa Korporatisme (NKK/BKK) yang dimulai sejak tahun 1978 hingga 1990.[2] Latar sosial pada saat itu menurutnya dicirikan kekuasaan otoritarian-birokratis-korporatis, terjadinya depolitisasi kampus, merebaknya klub-klub studi, dan implementasi pembangunanisme.

Dalam konteks sejarah yang sedemikian rupa, wajar jika BALAIRUNG lahir sebagai suatu wahana bagi "pemikir muda yang memilih jalan intelektual bagi isian kekhilafahan."[3] Prof. Teuku Jacob mendefinisikan BALAIRUNG sebagai "forum tempat bertemu dan bertukar pikiran, pendapat, dan pengalaman...BALAIRUNG diharapkan menjadi tempat mahasiswa mengasah pena, melatih diri untuk kehidupan pasca-univesiter, dengan tidak meninggalkan ciri kemahasiswaan, yaitu rasa ingin tahu dan mencoba melihat segala sesuatu secara ilmiah."[4]

Pada terbitan perdananya, BALAIRUNG mengangkat masalah industrialisasi. Tulisan-tulisan di dalamnya bersisi notulensi diskusi yang membahas tema, tulisan ilmiah tematik, dan tulisan nontematik. Namun, semakin lama porsi bagi tulisan ilmiah itu semakin sedikit. Dalam terbitan keduanya, BALAIRUNG mengubah nama rubrik "Tulisan Imiah" menjadi "Artikel Tema". Tulisan ilmiah tematik *Majalah BALAIRUNG* kala itu ialah rubrik "Temu Wicara" yang berisi notulensi diskusi dan "Artikel Tema" yang berisi tulisan-tulisan ilmiah. Selain itu, tulisan di *Majalah BALAIRUNG* isinya bermacam-macam. Misalnya, *Majalah BALAIRUNG* Edisi 16/ Th. VI/1992 mengangkat tema utama mengenai rencana pembangunan PLTN di Indonesia. Namun, ada juga artikel yang membahas pers mahasiswa, monopoli pemerintahan Orde Baru, dan seks bagi mahasiswa. Jadi, *Majalah BALAIRUNG*, meski mengangkat satu tema untuk dibahas, adalah kolase beragam isu yang diangkat dalam satu produk.

BALAIRUNG awalnya punya misi sebagai penerbitan berkala ilmiah, terlihat dari corak terbitan pertamanya. Namun, semakin lama BALAIRUNG justru mengedepankan produknya sebagai produk jurnalistik, terlihat dari semakin sedikitnya jumlah artikel tema dan munculnya rubrik "Berita Tema" sejak edisi 10/1989. Berita tema ini mirip dengan Laporan Utama yang kita kenal sekarang. Artikel-artikel tema paling-paling hanya ada satu di tiap edisi. Justru, *Majalah*

BALAIRUNG lebih banyak memuat hasil diskusi, berita tema, dan wawancara dengan ahli.

Ternyata, edisi 10/1989 menjadi tonggak sejarah BALAIRUNG, sebab "pertama, sejak edisi inilah dimunculkan rubrik Berita Tema yang sedikit banyak mengawali peralihan orientasi redaksionalnya, dan kedua, sejak edisi ini pula teknik *investigative reporting* dilakukan dan ditulis dengan gaya *feature*".[5] Meski begitu, mulai edisi th. VIII/1994, *Majalah* BALAIRUNG edisi khusus jurnal memuat kumpulan tulisan dari mahasiswa-mahasiswa UGM mengenai tema tertentu. Di edisi tersebut, tema yang diangkat ialah Indonesia 25 tahun ke depan. Kemudian, di tahun 1996 terbit BALAIRUNG Edisi Khusus yang dalam "Dapur"-nya disebutkan bahwa "jurnal mahasiswa itulah obsesi kami di BALAIRUNG". Tujuan menerbitkan edisi khusus yang berupa jurnal ilmiah tersebut ialah "memberi tempat bagi pemikiran mahasiswa pada posisi yang penting."

Saya rasa BALAIRUNG mengalami perubahan besar setelah Reformasi. Pada tahun 1998, tahun terjadinya demo besar-besaran menuntut Soeharto mundur, muncul keresahan dalam diri BALAIRUNG. Sederhananya begini: pers mahasiswa di satu sisi "tak bersungguh-sungguh untuk bekerja dengan tatanan dan logika pers umum ... Sedangkan pada saat yang lain, para awak persma mengklaim dirinya sebagai bagian dari pergerakan politik mahasiswa. Namun, ketika terjadi penggebukan aksi mahasiswa oleh militer, misalnya, awak persma mengaku justru sebagai 'wartawan mahasiswa'."[6] Akibat keresahan itu, BALAIRUNG menyelenggarakan Sarasehan Pers Mahasiswa se-Jawa-Bali pada 2 November 1998. Hasil sarasehan tersebut memunculkan tawaran bagi persma setelah 21 Mei 1998, yakni "(1) kembali menjadi *community papers* di kampus, atau (2) memperserius untuk menjadi *press of discourse*".[7]

Pertemuan tersebut ialah embrio lahirnya *Balkon* dan Jurnal secara resmi. BALAIRUNG memilih untuk menjadi pers komunitas dan pers wacana. Pers komunitas dimanifestasikan melalui produk buletin yang diberi nama Balkon. Produk ini terbit sejak 25 April 2000. Sementara pers wacana dimanifestasikan melalui jurnal ilmiah yang diberi nama *Jurnal BALAIRUNG*. Jurnal ini terbit pertama kali pada tahun 2001. Dengan menerbitkan jurnal ilmiah, BALAIRUNG melakukan reposisi. Majalah yang sebelumnya menjadi produk utama digantikan oleh jurnal.

Namun, dalam perkembangannya, Balkon sekarang sudah tidak terbit lagi. Sementara jurnal, sejak awal ditetapkannya menjadi produk BALAIRUNG, tidak pernah konsisten terbit. Selain itu, secara konseptual, Jurnal BALAIRUNG tidak pernah matang mengenai bagaimana menggabungkan pendekatan jurnalistik dan ilmiah. Di sisi lain, *Majalah BALAIRUNG* terbit lagi pada tahun 2012. BALAIRUNG pasca '98 memang agak rumit, sebab terjadi berbagai perpindahan. Mungkin, BALAIRUNG belum benar-benar bisa mencari jati dirinya semenjak Sarasehan '98 itu diselenggarakan. Apa sampai sekarang BALAIRUNG masih disorientasi? [Omong-omong, apa itu jati diri? Pernahkah BALAIRUNG punya jati diri?]

Apa itu yang dinamakan BALAIRUNG? Bagi saya, tiap generasi punya hak untuk mendefinisikannya. Saya mengamini pernyataan Jacques Derrida, "*One is responsible not only for what comes before one, but also before what is to come...An heir is not only someone who receives, he or she is someone who chooses, and takes the risk of deciding.*"[8] Dalam istilah lain, bisa juga disebut bahwa tiap generasi adalah "agen kebudayaan", bukan hanya "resipien kebudayaan". Maka dari itu, masih dalam kemelut setelah '98, 20 tahun setelahnya, BALAIRUNG memilih dan menerima segala risiko dalam memilih itu. Rasionalisasinya kira-kira seperti ini: merujuk pada pemetaan yang dilakukan Hs. Bachtiar, pers mahasiswa tersituasikan dalam interseksi antara pers umum, aktivisme mahasiswa, kegiatan akademis, dan kehendak masa muda.[9]

> "Tiap generasi adalah 'agen kebudayaan', bukan hanya 'resipien kebudayaan'"

Dengan rumusan ini, bagi saya ada tiga komponen utama pers mahasiswa, yakni: jurnalisme, intelektualisme, dan aktivisme. Tiga hal yang abstrak ini dikonkretkan dalam bentuk produk dan kegiatan-kegiatan. BALAIRUNG menerbitkan Majalah dan laman daring *balairungpress.com* untuk memuat tulisan-tulisan jurnalistik. Selain itu, BALAIRUNG juga menerbitkan jurnal ilmiah sebagai manifestasi intelektualitasnya. *balairungpress.com* juga memuat tulisan-tulisan ilmiah. Di samping itu, BALAIRUNG juga mengadakan diskusi-diskusi rutin yang memperbincangkan teori ilmiah atau keadaan masyarakat pada umumnya. Perihal aktivisme, BALAIRUNG, sesuai dengan Anggaran Dasar, tetap membela kepentingan masyarakat secara umum, dan khusunya kaum yang tertindas, melalui produk-produknya. Namun, tidak menutup kemungkinan, BALAIRUNG secara kelembagaan bisa melakukan unjuk rasa atau demonstrasi jika hal yang disuarakan dirasa sangat genting.

Saya rasa, inilah rumusan yang pas untuk saat ini. Hal ini juga merupakan suatu upaya *urun rembug* perihal perkembangan pers mahasiswa, khususnya BALAIRUNG, pasca '98. Dengan tiga produk utama, Jurnal, Majalah, dan *balairungpress.com*, kami berharap bisa menanggapi zaman yang kami hidupi ini. Adalah hal yang niscaya jika suatu saat nanti orang-orang yang berkecimpung di BALAIRUNG merasa perlu diadakan perubahan, dan itu sah-sah saja. Asalkan, segalanya dilaksanakan melalui musyawarah dan pembacaan yang dalam. Perlukah diadakan Sarasehan Pers Mahasiswa lagi? Biarkan waktu yang menjawab. **[Penjaga Dapur]**

Bulaksumur, Mei 2018

Catatan Akhir

1. Interpolasi dari buku AF. Chalmers yang berjudul *Apa itu yang dinamakan Ilmu?*
2. Hs, Bachtiar, "Suatu BALAIRUNG Inc.: tentang "I'm just a moderator" dan "karir penaklukan", Laporan Pemimpin Umum BALAIRUNG periode 2000--2001
3. Dapur BALAIRUNG, Majalah BALAIRUNG, No.1 Tahun 1 Januari 1986, hlm. 3
4. Teuku Jacob, "Sebuah Balairung Tulisan", Majalah BALAIRUNG, No.1 Tahun 1 Januari 1986, hlm. 2
5. Kurniawan, "Membuka Jendela, Memanah Rembulan", Majalah BALAIRUNG Edisi
6. Hs. Bachtiar, "Bekerja dengan Detail", Jurnal BALAIRUNG Edisi Pertama, 2000
7. *Ibid*
8. Jacques Derrida, *For What Tomorrow...A Dialogue*, 2004, hlm. 5—8
9. Hs. Bachtiar, "Pers Mahasiswa Pasca-21 Mei 1998: Menuntaskan Romantisme Sejarah", artikel untuk Sarasehan Nasional Pers Mahasiswa tahun 2000 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
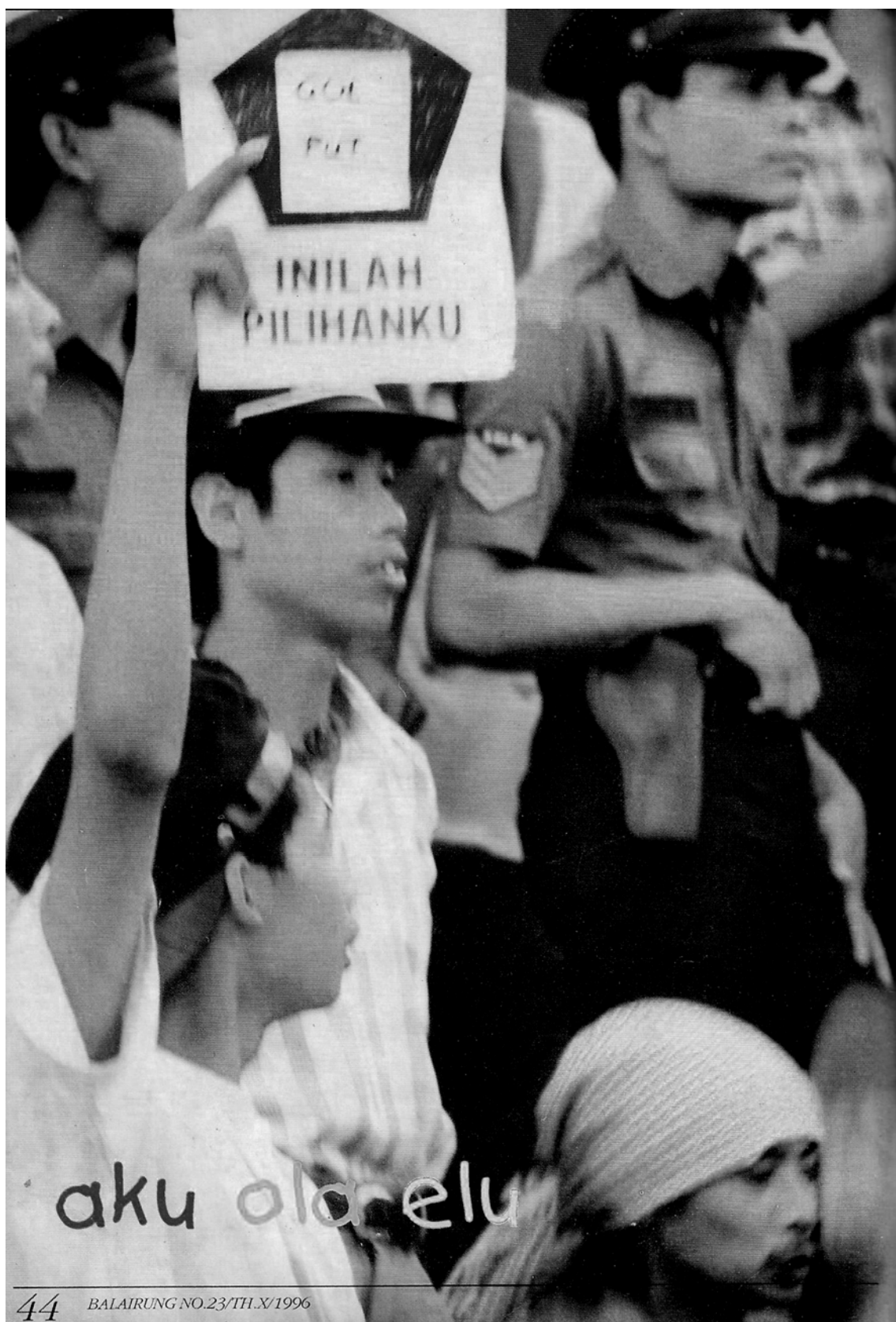
Foto berjudul “aku ola elu” direproduksi dari *Majalah BALAIRUNG* No. 23/Th. X/1996.

Insyaallah Terbit Segera

Hewan dan Manusia

BALAIRUNG

Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Indonesia

Vol. 1 No. 2 Tahun 2018